

MEMBANGUN EKONOMI INDONESIA YANG BERKEADILAN

Pertumbuhan, Pemerataan, dan Martabat Rakyat

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyclt.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

RudyCT Academic Series 2026



Membangun Ekonomi Indonesia yang Berkeadilan:

Pertumbuhan, Pemerataan, dan Martabat Rakyat



PERTUMBUHAN

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing global.



PEMERATAAN

Memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.



MARTABAT

Menegakkan keadilan sosial, menjunjung hak asasi, dan martabat setiap warga negara.



PRODUKTIVITAS

Meningkatkan produktivitas SDM, teknologi, dan kewirausahaan untuk nilai tambah tinggi.



KESEJAHTERAAN

Mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

EKONOMI INDONESIA UNTUK RAKYAT

- Berpihak pada rakyat kecil
- Berbasis potensi lokal
- Kolaboratif & inklusif
- Berdaulat & berkelanjutan



Oleh: **Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD**



www.rudyc.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)



Abstrak

Indonesia menghadapi tantangan pembangunan yang tidak cukup dijawab oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) semata. Pertumbuhan tetap merupakan fondasi penting bagi penciptaan pekerjaan, investasi, penerimaan negara, dan peningkatan pendapatan, tetapi kualitas pertumbuhan ditentukan oleh bagaimana manfaatnya didistribusikan, bagaimana kesempatan ekonomi dibuka, dan bagaimana kebijakan memperlakukan manusia sebagai subjek pembangunan yang bermartabat. Artikel ini mengembangkan kerangka pembangunan ekonomi berkeadilan yang memadukan pertumbuhan, pemerataan, produktivitas, mobilitas sosial, perlindungan sosial, serta martabat rakyat. Data resmi terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025 dan 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Pada September 2025 tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang, sementara Gini Ratio pengeluaran menurun menjadi 0,363. Perkembangan tersebut menunjukkan kemajuan, tetapi tantangan tetap besar: kesenjangan desa-kota, kualitas pekerjaan, sektor informal, ketimpangan aset, biaya perumahan, akses layanan, ketahanan kelas menengah, konsentrasi ekonomi wilayah, serta risiko digital dan ekologis. Artikel membedakan keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan kesempatan, keadilan pengakuan, dan keadilan antargenerasi. Martabat rakyat diposisikan sebagai prinsip yang menuntut pekerjaan layak, perlakuan setara di hadapan institusi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan bermutu, perlindungan dari eksploitasi, ruang berpartisipasi, keamanan ekonomi, serta kemampuan membangun masa depan. Pembahasan mencakup transformasi struktural, upah dan produktivitas, UMKM, kelas menengah, perpajakan, subsidi, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, ketahanan pangan, desentralisasi, hilirisasi, AI dan ekonomi digital, ekonomi hijau, gender, pemuda, disabilitas, wilayah pesisir, serta tata kelola. Artikel mengusulkan kerangka 'Growth-Justice-Dignity Framework' dengan lima pertanyaan: apakah ekonomi menciptakan nilai, apakah nilai tersebar, apakah peluang terbuka, apakah proses adil, dan apakah manusia diperlakukan dengan martabat. Kesimpulan utama adalah bahwa pembangunan berkeadilan bukan antitesis pertumbuhan. Sebaliknya, keadilan dapat memperkuat pertumbuhan melalui human capital yang lebih luas, pasar domestik yang lebih kuat, kepercayaan institusional, mobilitas sosial, dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Indonesia menuju 2045 perlu mengejar bukan hanya negara berpendapatan tinggi, tetapi masyarakat dengan kesempatan yang semakin luas, pekerjaan yang bermartabat, layanan publik yang dapat dipercaya, kepemilikan aset yang lebih tersebar, dan institusi yang menghormati setiap warga.

Kata Kunci

pertumbuhan ekonomi; pemerataan; keadilan ekonomi; martabat rakyat; mobilitas sosial; produktivitas; pekerjaan layak; kebijakan fiskal; perlindungan sosial; Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi adalah syarat penting, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan. Perekonomian yang tumbuh dapat tetap menghasilkan rasa ketidakadilan bila pekerjaan tidak aman, upah tidak mengikuti produktivitas, biaya hidup meningkat, atau akses terhadap layanan bermutu sangat berbeda.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Pada triwulan I-2026 ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sementara struktur spasial masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Pada September 2025 tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perdesaan 10,72 persen tetap lebih tinggi daripada perkotaan 6,60 persen, menunjukkan bahwa keadilan wilayah belum selesai.

Gini Ratio pengeluaran turun menjadi 0,363 pada September 2025. Namun ketimpangan pengeluaran tidak menangkap seluruh ketimpangan kekayaan, tanah, rumah, pendidikan bermutu, pekerjaan formal, kekuasaan pasar, atau akses politik.

Martabat rakyat menuntut lebih dari pendapatan minimum. Manusia membutuhkan kesempatan untuk bekerja tanpa eksploitasi, memperoleh perlakuan adil, memiliki suara, membangun aset, melindungi keluarga dari shock, serta merencanakan masa depan.

Keadilan ekonomi memiliki sedikitnya lima dimensi: distributif, prosedural, kesempatan, pengakuan, dan antargenerasi. Kebijakan yang hanya memindahkan pendapatan tanpa memperbaiki peluang dan institusi akan menghasilkan pemerataan yang rapuh.

Pekerjaan produktif merupakan saluran utama antara pertumbuhan dan martabat. Pekerjaan memberi pendapatan, identitas, pengalaman, jaringan, dan kemampuan membangun aset. Karena itu, job-rich productivity menjadi inti agenda.

Negara berkeadilan harus membangun universal basic services berkualitas, perlindungan sosial adaptif, sistem pajak yang wajar, transportasi dan perumahan terjangkau, serta pemerintahan yang tidak memerlukan koneksi personal untuk memperoleh hak.

Transformasi digital dan AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi dapat pula memperbesar konsentrasi serta kesenjangan keterampilan. Kebijakan perlu memastikan akses, reskilling, competition, data rights, dan human oversight.

Ekonomi hijau dan hilirisasi harus dinilai dari dampak terhadap pekerjaan, wilayah, ekosistem, dan generasi mendatang. Pembangunan tidak dapat disebut adil bila manfaat dinikmati sekarang sementara biaya ekologis diwariskan.

Daftar Isi

1. Pendahuluan: Pertumbuhan untuk Siapa?
2. Kondisi Ekonomi Indonesia 2025-2026
3. Makna Keadilan Ekonomi
4. Martabat Rakyat sebagai Tujuan Pembangunan
5. Dari PDB menuju Kesejahteraan dan Kapabilitas
6. Kemiskinan, Kerentanan, dan Rasa Aman Ekonomi
7. Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan
8. Pekerjaan Layak sebagai Fondasi Martabat
9. Upah, Produktivitas, dan Pembagian Nilai
10. Informalitas dan Hak Ekonomi
11. UMKM, Perusahaan Menengah, dan Kesempatan Naik Kelas
12. Pendidikan, Talenta, dan Mobilitas Sosial
13. Kesehatan, Gizi, dan Martabat
14. Perumahan, Transportasi, dan Hak atas Kota
15. Pangan, Harga, dan Daya Beli
16. Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga
17. Pajak, Subsidi, dan Kontrak Sosial
18. Pemerataan Antar-Wilayah dan Desentralisasi
19. Hilirisasi yang Berkeadilan
20. Transformasi Digital, AI, dan Keadilan Baru
21. Ekonomi Hijau dan Keadilan Antar-Generasi
22. Gender, Pemuda, Disabilitas, dan Pengakuan
23. Tata Kelola, Hukum, dan Keadilan Prosedural
24. Studi Kasus Analitis
25. Growth-Justice-Dignity Framework
26. Peta Jalan Indonesia 2026-2045
27. Agenda Kebijakan Prioritas
28. Implikasi bagi Manajemen dan Bisnis
29. Agenda Riset IBM ASMI
30. Kesimpulan: Ekonomi yang Membesarkan Manusia

Glossarium

Daftar Pustaka

1. Pendahuluan: Pertumbuhan untuk Siapa?

Pertumbuhan memperbesar kapasitas ekonomi. Dalam konteks 1. pendahuluan: pertumbuhan untuk siapa?, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Distribusi menentukan pengalaman warga. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Martabat memberi ukuran normatif. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Keadilan memerlukan proses dan hasil. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Pembangunan harus membesarkan manusia. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

2. Kondisi Ekonomi Indonesia 2025-2026

Pertumbuhan relatif kuat. Dalam konteks 2. kondisi ekonomi indonesia 2025-2026, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Kemiskinan menurun. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Gini pengeluaran membaik. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Konsentrasi Jawa tetap tinggi. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Momentum perlu diperdalam. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

3. Makna Keadilan Ekonomi

Keadilan distributif membahas hasil. Dalam konteks 3. makna keadilan ekonomi, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Keadilan prosedural membahas proses. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Keadilan kesempatan membahas titik awal. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Keadilan pengakuan membahas martabat dan identitas. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Keadilan antargenerasi membahas masa depan. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

4. Martabat Rakyat sebagai Tujuan Pembangunan

Martabat berarti manusia bukan alat. Dalam konteks 4. martabat rakyat sebagai tujuan pembangunan, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Pekerjaan harus menghormati manusia. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Layanan publik tidak boleh merendahkan. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Partisipasi memperkuat agency. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Rasa aman memungkinkan perencanaan hidup. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

5. Dari PDB menuju Kesejahteraan dan Kapabilitas

PDB mengukur aktivitas. Dalam konteks 5. dari pdb menuju kesejahteraan dan kapabilitas, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB

dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Kapabilitas mengukur kebebasan nyata. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Health dan education memperluas pilihan. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Waktu dan lingkungan penting. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Dashboard lebih tepat daripada satu angka. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

6. Kemiskinan, Kerentanan, dan Rasa Aman Ekonomi

Garis kemiskinan penting. Dalam konteks 6. kemiskinan, kerentanan, dan rasa aman ekonomi, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Near-poor mudah turun kembali. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Shock kesehatan dan pekerjaan besar. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Kelas menengah juga rentan. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Resilience perlu diukur. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

7. Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan

Pendapatan mengalir tiap periode. Dalam konteks 7. ketimpangan pendapatan dan kekayaan, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Kekayaan menumpuk antarwaktu. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Aset memberi keamanan. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Warisan memengaruhi peluang. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Kebijakan perlu menyentuh ownership. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

8. Pekerjaan Layak sebagai Fondasi Martabat

Pekerjaan menghubungkan pertumbuhan dengan manusia. Dalam konteks 8. pekerjaan layak sebagai fondasi martabat, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Upah bukan satu-satunya aspek. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Keamanan dan voice penting. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Skill menciptakan prospek. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Decent work adalah agenda produktivitas. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

9. Upah, Produktivitas, dan Pembagian Nilai

Produktivitas memberi ruang upah. Dalam konteks 9. upah, produktivitas, dan pembagian nilai, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Market power memengaruhi pembagian. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Inflasi menentukan upah riil. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Bargaining dan competition penting. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Wage ladder perlu dibangun. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

10. Informalitas dan Hak Ekonomi

Informalitas luas di negara berkembang. Dalam konteks 10. informalitas dan hak ekonomi, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Fleksibilitas memiliki manfaat. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Perlindungan sering rendah. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Formalisasi harus memberi manfaat. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Transisi perlu gradual. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

11. UMKM, Perusahaan Menengah, dan Kesempatan Naik Kelas

UMKM menyerap tenaga kerja. Dalam konteks 11. umkm, perusahaan menengah, dan kesempatan naik kelas, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Tidak semua usaha ingin scale. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Missing middle penting. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Management menentukan produktivitas. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Supplier linkage memperkuat mobility. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

12. Pendidikan, Talenta, dan Mobilitas Sosial

Pendidikan memperluas peluang. Dalam konteks 12. pendidikan, talenta, dan mobilitas sosial, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Kualitas lebih penting dari enrollment. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

PAUD memiliki efek panjang. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

TVET perlu terhubung industri. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Lifelong learning semakin penting. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

13. Kesehatan, Gizi, dan Martabat

Kesehatan menentukan kemampuan bekerja. Dalam konteks 13. kesehatan, gizi, dan martabat, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Biaya sakit dapat memiskinkan. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Gizi memengaruhi seumur hidup. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Primary care penting. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Pelayanan harus manusiawi. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

14. Perumahan, Transportasi, dan Hak atas Kota

Lokasi adalah kesempatan. Dalam konteks 14. perumahan, transportasi, dan hak atas kota, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Housing mahal mengurangi disposable income. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan

mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Transit memperluas akses pekerjaan. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Sprawl menciptakan biaya. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Kota harus produktif dan terjangkau. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

15. Pangan, Harga, dan Daya Beli

Pangan dominan bagi kelompok bawah. Dalam konteks 15. pangan, harga, dan daya beli, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Inflasi pangan regresif. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Produktivitas petani penting. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Logistik menurunkan spread. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Stabilitas perlu berbasis sistem. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

16. Perlindungan Sosial dan Ketahanan Keluarga

Transfer melindungi konsumsi. Dalam konteks 16. perlindungan sosial dan ketahanan keluarga, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Shock membutuhkan respons cepat. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Data harus dinamis. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Graduasi perlu lembut. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Safety net dapat produktif. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

17. Pajak, Subsidi, dan Kontrak Sosial

Pajak membiayai hak sosial. Dalam konteks 17. pajak, subsidi, dan kontrak sosial, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Fairness memengaruhi kepatuhan. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Subsidi universal dapat regresif. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Tax expenditure perlu transparan. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Belanja harus membangun kapabilitas. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

18. Pemerataan Antar-Wilayah dan Desentralisasi

Daerah memiliki potensi berbeda. Dalam konteks 18. pemerataan antar-wilayah dan desentralisasi, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Transfer mengurangi gap kapasitas. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Institusi menentukan hasil. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Kota tier-2 penting. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Pemerataan bukan menyamakan semuanya. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

19. Hilirisasi yang Berkeadilan

Hilirisasi menaikkan nilai tambah. Dalam konteks 19. hilirisasi yang berkeadilan, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Linkage menentukan multiplier. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Pekerja lokal perlu skill. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Daerah perlu aset jangka panjang. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Lingkungan harus diperhitungkan. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

20. Transformasi Digital, AI, dan Keadilan Baru

Digital membuka pasar. Dalam konteks 20. transformasi digital, ai, dan keadilan baru, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

AI mengubah pekerjaan. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Data menjadi sumber kekuasaan. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Platform dapat terkonsentrasi. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Hak dan akses perlu dijaga. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

21. Ekonomi Hijau dan Keadilan Antar-Generasi

Transisi mengurangi risiko iklim. Dalam konteks 21. ekonomi hijau dan keadilan antar-generasi, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Pekerja lama dapat terdampak. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Daerah fosil perlu diversifikasi. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Modal alam adalah warisan. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Generasi masa depan memiliki kepentingan. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

22. Gender, Pemuda, Disabilitas, dan Pengakuan

Kesempatan berbeda antar kelompok. Dalam konteks 22. gender, pemuda, disabilitas, dan pengakuan, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Care burden memengaruhi perempuan. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Pemuda menghadapi transisi kerja. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Disabilitas sering menghadapi barrier lingkungan. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Recognition penting. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

23. Tata Kelola, Hukum, dan Keadilan Prosedural

Aturan harus berlaku setara. Dalam konteks 23. tata kelola, hukum, dan keadilan prosedural, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Pelayanan tidak boleh bergantung koneksi. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Appeal penting. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Transparansi membangun trust. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Merit memperkuat fairness. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

24. Studi Kasus Analitis

Kasus memperlihatkan mekanisme nyata. Dalam konteks 24. studi kasus analitis, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Trade-off tidak seragam. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Data lokal penting. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Voice masyarakat diperlukan. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Evaluasi harus melihat outcome. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

25. Growth-Justice-Dignity Framework

Pertumbuhan menciptakan nilai. Dalam konteks 25. growth-justice-dignity framework, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Pemerataan menyebarkan manfaat. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Kesempatan membuka mobilitas. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Proses adil menciptakan trust. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Martabat memberi tujuan moral. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

26. Peta Jalan Indonesia 2026-2045

Fase awal memperkuat fondasi. Dalam konteks 26. peta jalan indonesia 2026-2045, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Fase tengah memperdalam mobilitas. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Fase akhir membangun masyarakat berpendapatan tinggi. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Institusi perlu konsisten. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Evaluasi harus adaptif. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Dimensi	Pertanyaan Kunci	Indikator
Nilai	Apakah ekonomi menciptakan nilai?	PDB, produktivitas
Distribusi	Siapa menikmati hasil?	Gini, bottom 40
Kesempatan	Siapa dapat berpartisipasi?	Education, jobs
Prosedur	Apakah proses adil?	Access, appeal, trust
Martabat	Apakah manusia dihormati?	Job quality, service
Masa depan	Apa yang diwariskan?	Assets, environment

27. Agenda Kebijakan Prioritas

Prioritas harus terbatas dan terukur. Dalam konteks 27. agenda kebijakan prioritas, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Pekerjaan produktif menjadi pusat. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Layanan dasar harus berkualitas. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Aset perlu diperluas. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Wilayah perlu diperkuat. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

28. Implikasi bagi Manajemen dan Bisnis

Bisnis membagi nilai melalui upah. Dalam konteks 28. implikasi bagi manajemen dan bisnis, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Supplier inclusion penting. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

AI memerlukan reskilling. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Governance memengaruhi trust. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Shared prosperity dapat menjadi strategi. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

29. Agenda Riset IBM ASMI

Riset perlu lintas disiplin. Dalam konteks 29. agenda riset ibm asmi, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Data Indonesia harus diperkuat. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Metode kuantitatif dan kualitatif dikombinasikan. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Manajemen perlu melihat fairness. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Kampus dapat menjadi forum kebijakan. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

30. Kesimpulan: Ekonomi yang Membesarkan Manusia

Ekonomi adalah sarana. Dalam konteks 30. kesimpulan: ekonomi yang membesarkan manusia, titik awal analisis adalah bahwa output ekonomi hanya menjadi kesejahteraan ketika terhubung dengan kehidupan nyata. PDB dapat bertambah karena investasi, ekspor, atau konsumsi, tetapi pengalaman rakyat ditentukan oleh pekerjaan, harga, akses layanan, keamanan, dan kesempatan.

Martabat adalah tujuan. Keadilan tidak menuntut semua hasil sama. Ia menuntut aturan yang tidak memihak, peluang yang cukup terbuka, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan mekanisme agar keuntungan produktivitas tidak terkonsentrasi secara tidak proporsional. Perbedaan hasil dapat diterima bila proses dan kesempatan memiliki legitimasi.

Pertumbuhan tetap penting. Martabat memberi dimensi yang sering hilang dari analisis ekonomi. Seseorang dapat menerima transfer tetapi tetap merasa tidak bermartabat jika harus melalui prosedur yang merendahkan, tidak memiliki suara, atau diperlakukan sebagai objek. Pelayanan publik dan hubungan kerja perlu menghormati agency manusia.

Keadilan memperkuat legitimasi. Produktivitas tetap menjadi fondasi. Tanpa produktivitas, upah, penerimaan pajak, dan kualitas layanan sulit meningkat secara berkelanjutan. Namun produktivitas perlu dipadukan dengan competition, labor institutions, human capital, dan kebijakan aset agar manfaatnya menyebar.

Indonesia dapat menggabungkan semuanya. Indonesia juga perlu membaca keadilan secara spasial dan antargenerasi. Daerah dengan biaya layanan tinggi membutuhkan dukungan berbeda, sementara keputusan hari ini tentang utang, iklim, sumber daya, dan pendidikan akan menentukan peluang generasi berikut.

Karena itu, kebijakan berkeadilan bukan kebijakan yang memilih antara pasar dan negara, pertumbuhan dan redistribusi, atau teknologi dan pekerjaan. Ia mencari kombinasi institusi yang membuat pasar produktif, negara dapat dipercaya, masyarakat memiliki daya tawar, dan perubahan ekonomi menghasilkan mobilitas.

Studi Kasus Analitis

Kasus 1: Hilirisasi Mineral dan Martabat Pekerja

Pabrik baru dapat meningkatkan PDRB dan ekspor. Namun pembangunan berkeadilan menilai keselamatan, upah, jam kerja, jalur karier, akomodasi pekerja, supplier lokal, serta dampak lingkungan. Nilai tambah tinggi tidak boleh dibayar dengan kondisi kerja yang merendahkan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 2: Kota Besar dan Pekerja Berupah Menengah

Seorang pekerja dapat memperoleh gaji lebih tinggi di kota besar tetapi membayar sewa, transportasi, childcare, dan pendidikan lebih mahal. Pemerataan perlu melihat disposable income serta waktu perjalanan, bukan wage nominal saja.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 3: Bantuan Sosial dan Martabat Penerima

Transfer tunai dapat mencegah kelaparan dan penjualan aset, tetapi proses verifikasi yang memalukan atau ketidakjelasan hak mengurangi martabat. Sistem yang sederhana, transparan, dan memiliki mekanisme banding lebih adil.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 4: Digital Lending

Pinjaman digital memperluas akses modal tetapi dapat menimbulkan over-indebtedness, harassment, atau opaque scoring. Inklusi finansial harus disertai affordability, data rights, serta penagihan yang bermartabat.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 5: AI dalam Rekrutmen

AI dapat mempercepat seleksi tetapi bias data dapat menyingkirkan kelompok tertentu. Kandidat harus memiliki hak mengetahui proses serta meminta review manusia pada keputusan berdampak besar.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 6: Transportasi Umum dan Akses Kerja

Bus atau kereta yang andal memperluas jumlah pekerjaan yang dapat dijangkau tanpa kendaraan pribadi. Ini merupakan redistribusi kesempatan melalui infrastruktur, bukan melalui transfer uang.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 7: Perumahan Terjangkau

Rumah bersubsidi jauh dari pusat kerja dapat terlihat murah tetapi menciptakan biaya waktu tinggi. Kebijakan yang berkeadilan mempertimbangkan lokasi, akses transit, sekolah, dan peluang kerja.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 8: Petani dan Stabilitas Harga

Harga pangan murah penting bagi konsumen, tetapi tekanan harga yang terus-menerus dapat memiskinkan petani. Solusi jangka panjang adalah produktivitas, storage, logistics, market competition, dan risk-sharing.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 9: Pekerja Gig

Platform menawarkan fleksibilitas tetapi pendapatan tidak pasti dan perlindungan lemah. Portable benefits, transparansi fee, dan mekanisme appeal dapat menjaga fleksibilitas sekaligus martabat.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 10: Transisi Energi di Daerah Batubara

Penurunan batubara mungkin diperlukan untuk iklim, tetapi pekerja dan daerah yang bergantung pada sektor tersebut tidak boleh dibiarkan menanggung biaya sendiri. Reskilling, diversification, dan fiscal transition menjadi kewajiban keadilan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 11: Pelayanan Rumah Sakit

Hak kesehatan tidak hanya berarti tersedia fasilitas. Waktu tunggu, informasi, komunikasi, privasi, dan penghormatan menentukan martabat pasien. Quality of care memiliki dimensi etis dan ekonomi.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 12: Pendidikan di Daerah Terpencil

Anak yang lahir di wilayah terpencil tidak memilih kondisi geografisnya. Negara berkeadilan perlu menerima biaya layanan lebih tinggi untuk memberi kesempatan belajar yang setara secara substantif.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 13: Pengadaan UMKM

Quota pengadaan dapat membuka pasar bagi UMKM, tetapi pembayaran terlambat justru merusak cash flow. Keadilan prosedural membutuhkan tender yang dapat diakses, pembayaran tepat waktu, dan mekanisme keberatan.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 14: Relokasi Permukiman Rentan

Pemindahan warga dari kawasan bencana dapat meningkatkan keselamatan tetapi merusak mata pencaharian jika lokasi baru jauh dari pekerjaan. Martabat menuntut partisipasi, pilihan, kompensasi, dan pemulihan livelihood.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Kasus 15: Data Sosial dan Hak Warga

Integrasi data memperbaiki targeting, tetapi warga harus dapat memperbaiki kesalahan. Algoritma yang menolak bantuan tanpa penjelasan menimbulkan ketidakadilan prosedural.

Kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan berkeadilan selalu melibatkan sedikitnya tiga pertanyaan: apakah hasil ekonominya baik, apakah manfaat dan beban dibagi secara wajar, dan apakah prosesnya memperlakukan manusia sebagai pihak yang memiliki hak serta suara.

Pendalaman Teoretis: Keadilan, Kapabilitas, dan Martabat

A. Keadilan Distributif

Keadilan distributif membahas bagaimana pendapatan, kekayaan, peluang, dan beban dibagi. Tidak ada satu formula yang diterima semua teori. Egalitarianisme memberi bobot besar pada kesetaraan, utilitarianisme pada total kesejahteraan, sementara pendekatan prioritarian memberi perhatian lebih pada mereka yang paling buruk posisinya.

Dalam kebijakan ekonomi, fokus distributif berarti setiap reformasi besar perlu mengidentifikasi kelompok yang menerima manfaat dan biaya. Average net benefit dapat positif sementara kelompok tertentu mengalami kerugian besar.

Distributional impact assessment dapat diterapkan pada subsidi, pajak, tarif transportasi, carbon pricing, dan kebijakan perdagangan. Analisis perlu memperhitungkan direct dan indirect effect.

Redistribusi juga memiliki dimensi waktu. Pendidikan memberikan manfaat bertahun-tahun, sedangkan cash transfer bekerja cepat. Portofolio kebijakan perlu menyeimbangkan.

Keadilan distributif yang sehat tidak hanya membagi konsumsi tetapi memperluas kemampuan menghasilkan pendapatan dan aset.

B. Keadilan Prosedural

Orang sering menerima hasil yang kurang menguntungkan bila proses dianggap adil, konsisten, transparan, dan memberi kesempatan didengar. Sebaliknya, hasil material dapat menimbulkan kemarahan jika diperoleh melalui favoritisme.

Dalam pelayanan publik, procedural justice berarti syarat jelas, waktu layanan dapat diprediksi, keputusan memiliki alasan, dan terdapat mekanisme banding. Sistem digital sebaiknya memperkuat, bukan menghilangkan, prinsip ini.

Dalam bisnis, procedural fairness mencakup promosi, performance evaluation, discipline, dan grievance. Kepercayaan pekerja dipengaruhi cara keputusan dibuat.

Dalam pengadaan dan investasi, aturan yang stabil serta tidak diskriminatif memperkuat legitimacy dan competition.

Keadilan prosedural merupakan bentuk martabat karena mengakui warga sebagai subjek hukum, bukan penerima belas kasihan.

C. Equality of Opportunity

Equality of opportunity menyoroti perbedaan hasil yang berasal dari keadaan yang tidak dipilih seseorang, seperti tempat lahir, kondisi keluarga, gender, disabilitas, atau akses awal terhadap pendidikan.

Kesempatan yang setara secara formal tidak cukup bila sekolah, kesehatan, dan jaringan sangat berbeda. Dua anak dapat menghadapi ujian yang sama tetapi memiliki persiapan yang sangat berbeda.

Kebijakan early childhood, gizi, sekolah, transportasi, internet, dan beasiswa mengurangi ketimpangan keadaan awal.

Mobility data membantu menilai apakah latar keluarga masih terlalu menentukan pendidikan serta pendapatan generasi berikut.

Kesetaraan kesempatan adalah kebijakan pro-produktivitas karena mengurangi pemborosan talenta.

D. Capability Approach

Amartya Sen menempatkan pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif: kemampuan nyata untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pendapatan adalah sarana, bukan tujuan tunggal.

Dua orang dengan pendapatan sama dapat memiliki capability berbeda karena kesehatan, disabilitas, lokasi, keamanan, atau tanggung jawab care. Karena itu, policy harus melihat conversion factors.

Pendidikan, health, mobility, dan political voice memperluas capability. Social protection mencegah capability jatuh setelah shock.

Pendekatan capability sangat relevan bagi martabat rakyat karena menolak menilai manusia hanya sebagai faktor produksi atau konsumen.

Ekonomi berkeadilan meningkatkan pilihan hidup tanpa memaksakan satu definisi kehidupan baik.

E. Rawls, Fairness, dan Institusi Dasar

Rawls menekankan bahwa institusi dasar masyarakat membentuk distribusi peluang serta keuntungan. Prinsip fairness mengarahkan perhatian pada aturan permainan, bukan hanya hasil akhir.

Difference principle memberi prioritas pada pengaturan ketimpangan yang menguntungkan kelompok paling kurang beruntung. Dalam praktik, ini mendorong pertanyaan apakah pertumbuhan sektor atau kebijakan tertentu memperbaiki posisi kelompok bawah.

Fair equality of opportunity menuntut lebih dari non-diskriminasi formal. Latar sosial tidak seharusnya terlalu menentukan peluang.

Institusi pajak, pendidikan, properti, labor, dan politik semuanya bagian struktur dasar. Reformasi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari institusi.

Konsep ini membantu melihat pemerataan sebagai desain sistem, bukan hanya program sosial.

F. Martabat dalam Ekonomi

Martabat berarti manusia memiliki nilai yang tidak dapat direduksi menjadi output, pendapatan, atau utility. Dalam ekonomi kerja, martabat berkaitan dengan keselamatan, penghormatan, voice, non-discrimination, dan kesempatan berkembang.

Pekerjaan yang membayar tetapi merendahkan, membahayakan, atau menghilangkan agency memiliki kualitas yang rendah. Decent work menggabungkan produktivitas dengan hak.

Pelayanan publik yang bermartabat tidak membuat warga memohon untuk hak yang sah. Informasi, privacy, akses, dan komunikasi menjadi penting.

Martabat juga berarti menghindari stigmatisasi penerima bantuan sosial. Targeting dapat dilakukan tanpa bahasa yang menyalahkan kemiskinan pada individu.

Prinsip martabat memberi batas pada instrumentalisme ekonomi: efisiensi tidak membenarkan setiap cara.

G. Recognition Justice

Keadilan pengakuan menekankan bahwa kelompok dapat dirugikan bukan hanya karena kekurangan sumber daya, tetapi karena identitas, pengalaman, atau pengetahuan mereka diabaikan.

Masyarakat adat, penyandang disabilitas, perempuan, pekerja informal, dan komunitas lokal sering menghadapi masalah recognition. Kebijakan yang dirancang tanpa mereka dapat gagal meski anggarannya besar.

Participatory process membantu tetapi harus substantif. Konsultasi setelah keputusan final hanya simbolik.

Recognition juga berlaku pada bahasa dan budaya layanan. Negara kepulauan dan plural memerlukan fleksibilitas.

Pengakuan memperkuat dignity karena menyatakan bahwa pengalaman warga memiliki nilai epistemik.

H. Keadilan Antar-Generasi

Generasi masa depan tidak memiliki suara dalam keputusan sekarang. Namun utang, perubahan iklim, deplesi sumber daya, serta kualitas pendidikan akan mereka warisi.

Keadilan antar-generasi menuntut investasi sekarang tidak hanya menghasilkan konsumsi, tetapi aset manusia, fisik, institusional, dan alam yang memadai.

Utang dapat adil bila membiayai aset yang manfaatnya lintas generasi. Utang untuk konsumsi tanpa kapasitas masa depan lebih problematis.

Ekonomi hijau, perlindungan biodiversity, dan natural capital merupakan bagian agenda martabat karena generasi mendatang juga berhak pada lingkungan layak.

Institusi perencanaan jangka panjang perlu memberi bobot pada dampak yang melampaui siklus pemilu.

I. Social Contract dan Legitimasi

Kontrak sosial ekonomi terbentuk ketika warga membayar pajak, mengikuti aturan, dan menerima keputusan karena percaya negara memberikan perlindungan serta kesempatan secara wajar.

Ketidakadilan yang dipersepsikan dapat menurunkan compliance walaupun layanan rata-rata membaik. Korupsi, privilege, dan patronage merusak legitimasi.

Universal services sering membangun solidarity karena semua kelompok memiliki kepentingan pada kualitas yang sama. Targeted program tetap diperlukan tetapi perlu menjaga dignity.

Transparansi anggaran serta procurement memperkuat hubungan antara kontribusi dan manfaat.

Legitimasi merupakan aset produktif karena menurunkan biaya enforcement serta meningkatkan cooperation.

J. Inclusive Institutions dan Mobilitas

Inclusive institutions memberi akses luas pada pasar, pendidikan, hukum, dan partisipasi. Extractive institutions mengonsentrasikan manfaat serta kekuasaan pada kelompok sempit.

Mobilitas ekonomi membutuhkan rule of law, competition, merit, dan akses finance. Bila koneksi lebih penting dari competence, talenta menjadi terbuang.

Institusi yang inklusif juga memerlukan state capacity. Hak formal tanpa layanan atau enforcement tidak cukup.

Desentralisasi dapat memperluas partisipasi tetapi juga membuka capture lokal. Checks and balances serta data publik diperlukan.

Pertumbuhan berkeadilan bergantung pada kemampuan institusi menyeimbangkan dynamism dan fairness.

Growth-Justice-Dignity Framework

Pilar	Pertanyaan	Indikator Utama	Risiko jika Lemah
Growth	Apakah nilai ekonomi bertambah?	PDB, produktivitas	Stagnasi
Distribution	Apakah manfaat tersebar?	Gini, bottom 40	Konsentrasi
Opportunity	Apakah orang dapat naik?	Mobility, learning	Inherited disadvantage
Procedure	Apakah aturan adil?	Trust, appeal, access	Capture
Dignity	Apakah manusia dihormati?	Job/service quality	Dehumanization

Future	Apakah pilihan diwariskan?	Assets, environment	Intergenerational debt
--------	----------------------------	---------------------	------------------------

Lima Skenario Indonesia 2045

Skenario 1: Kaya tetapi Terbelah

Pendapatan per kapita naik, tetapi kekayaan, akses kota, pendidikan bermutu, dan teknologi terkonsentrasi. Pertumbuhan tinggi tidak menghasilkan rasa keadilan dan trust menurun.

Skenario 2: Proteksi Sosial Besar, Produktivitas Lemah

Transfer meningkat, tetapi penciptaan pekerjaan serta produktivitas melambat. Negara menghadapi tekanan fiskal dan mobilitas sosial terbatas.

Skenario 3: Teknologi Cepat, Manusia Tertinggal

AI, otomatisasi, dan platform meningkatkan output, tetapi reskilling dan bargaining tertinggal. Wage gap serta market concentration meningkat.

Skenario 4: Hijau tetapi Tidak Adil

Dekarbonisasi berhasil, tetapi pekerja lama, daerah fosil, dan komunitas lokal menanggung biaya besar. Kebijakan kehilangan legitimasi.

Skenario 5: Ekonomi Produktif, Adil, dan Bermartabat

Produktivitas naik bersama pekerjaan layak, layanan publik bermutu, mobilitas sosial, kepemilikan aset, rule of law, dan transisi hijau yang adil.

Balanced Scorecard Ekonomi Berkeadilan

Perspektif	Tujuan	Indikator	Risiko
Pertumbuhan	Produktivitas naik	PDB, TFP	Stagnasi
Pekerjaan	Kerja layak	Upah riil, formalitas	Precarity
Pemerataan	Gap mengecil	Gini, bottom 40	Konsentrasi
Kapabilitas	Peluang meluas	Learning, health	Mobility trap
Aset	Keamanan ekonomi naik	Housing, savings, pension	Debt fragility
Wilayah	Kesempatan menyebar	Regional productivity	Enclave
Prosedur	Trust dan fairness	Complaint, appeal	Capture
Martabat	Pelayanan manusiawi	Experience metrics	Stigma
Generasi	Warisan membaik	Natural/human capital	Future burden

Peta Jalan Indonesia Berkeadilan 2026-2045

Tahap 1: Memperkuat Fondasi Keadilan (2026-2028)

Bangun dashboard growth-distribution-dignity, tingkatkan kualitas data kemiskinan dan aset, perbaiki mekanisme complaint, serta audit distribusi subsidi dan tax expenditure.

Tahap 2: Pekerjaan Produktif dan Layanan Dasar (2026-2032)

Fokus pada perusahaan menengah, supplier development, formalization benefit, apprenticeship, primary health, school quality, childcare, transportasi, dan perumahan.

Tahap 3: Asset-Building dan Mobilitas (2027-2035)

Perluas pension, saving, housing access, productive finance, scholarship, dan land administration agar rumah tangga membangun kekayaan, bukan hanya konsumsi.

Tahap 4: Pemerataan Wilayah Produktif (2027-2038)

Bangun kota tier-2, cluster, universitas, logistik, digital infrastructure, serta fiscal equalization yang dikaitkan dengan kebutuhan dan kapasitas.

Tahap 5: Transformasi Digital dan Hijau yang Adil (2028-2040)

Reskilling, portable protection, AI governance, competition, just transition, green jobs, dan ecological fiscal reform.

Tahap 6: Masyarakat Mobilitas Tinggi (2032-2045)

Kurangi pengaruh latar keluarga dan lokasi terhadap hasil melalui pendidikan, health, housing, mobility, serta merit-based institutions.

Tahap 7: Negara Berpendapatan Tinggi yang Bermartabat (2040-2045)

Ukur kemajuan dari kualitas hidup, trust, pekerjaan, mobility, aset, serta kemampuan generasi berikut memilih masa depannya.

Dua Puluh Rekomendasi Kebijakan

1. Menjadikan kualitas pekerjaan, upah riil median, dan formalitas sebagai indikator pembangunan nasional.
2. Mengembangkan ukuran kerentanan dan kelas menengah yang memasukkan biaya hidup, aset, utang, dan shock.
3. Memperkuat layanan dasar universal berkualitas agar social wage meningkat.
4. Mengintegrasikan childcare dengan strategi partisipasi kerja perempuan.
5. Mengembangkan perumahan terjangkau dekat pusat kerja dan transit.
6. Memperluas pensiun dan tabungan jangka panjang bagi pekerja informal.
7. Membangun perusahaan menengah melalui supplier development, management upgrading, dan finance.

8. Menghubungkan insentif investasi dengan local jobs, training, technology transfer, dan supplier.
9. Mengembangkan kota tier-2 sebagai pusat kesempatan ekonomi baru.
10. Mereformasi subsidi dan tax expenditure berdasarkan distribusi manfaat dan opportunity cost.
11. Memperkuat pajak properti dan land value capture dengan perlindungan kelompok rentan.
12. Membangun adaptive social protection yang responsif terhadap shock dan tidak menstigma penerima.
13. Menetapkan standar pelayanan publik yang mengukur pengalaman dan martabat pengguna.
14. Memastikan setiap keputusan administratif penting memiliki alasan dan mekanisme banding.
15. Mengembangkan AI governance untuk pekerjaan, kredit, dan layanan publik berisiko tinggi.
16. Memperluas data portability dan competition pada ekonomi platform.
17. Menyiapkan just transition plan pada daerah dan pekerja yang terdampak dekarbonisasi.
18. Memasukkan natural capital dan dampak antargenerasi ke penilaian proyek besar.
19. Menerbitkan laporan tahunan Pertumbuhan, Keadilan, dan Martabat Rakyat.
20. Menempatkan mobilitas sosial sebagai ukuran utama Indonesia Emas 2045.

Implikasi bagi Manajemen dan Bisnis

Perusahaan berperan langsung dalam distribusi nilai melalui wage, contract, supplier payment, training, safety, benefits, serta desain teknologi. Inclusive business tidak seharusnya dipersempit pada CSR.

Living wage discussion perlu dihubungkan dengan productivity, profitability, location cost, dan wage ladder. Perusahaan dapat membangun compensation yang memberi floor serta progression.

Supplier inclusion memperluas multiplier. Prompt payment, technical assistance, standard, dan forecast membantu perusahaan kecil berinvestasi.

AI adoption perlu disertai job redesign, reskilling, serta communication. Teknologi yang meningkatkan output tetapi menghancurkan trust dapat menghadapi turnover dan resistensi.

Employee voice melalui survey, grievance, works council, atau dialog dapat meningkatkan informasi manajemen serta procedural fairness.

Customer dignity juga penting. Dark patterns, opaque fees, abusive collection, dan discriminatory pricing dapat merusak legitimasi meski legal.

Data governance merupakan bagian martabat karena individu berhak mengetahui penggunaan data penting mereka. Consent, minimization, security, dan appeal perlu.

Shared prosperity dapat menjadi strategi kompetitif bila meningkatkan retention, supplier resilience, customer trust, serta license to operate.

ESG perlu memasukkan decent work, community impact, tax responsibility, dan just transition, bukan hanya carbon reporting.

Board perlu memahami bahwa ketimpangan dan social trust dapat menjadi strategic risk yang memengaruhi demand, regulation, serta investasi.

Agenda Riset IBM ASMI

1. Mengembangkan Growth-Justice-Dignity Index untuk provinsi Indonesia.
2. Menguji pengaruh perceived economic fairness terhadap trust in institutions dan willingness to comply.
3. Menguji hubungan job quality, dignity at work, dan employee engagement.
4. Menganalisis wage-productivity sharing pada perusahaan manufaktur dan jasa.
5. Mengembangkan model kerentanan kelas menengah berbasis income volatility, debt, housing, dan health shock.
6. Menguji dampak supplier inclusion terhadap local economic multiplier.
7. Menganalisis pengaruh childcare pada retention dan career progression perempuan.
8. Menguji fairness perception pada penggunaan AI untuk recruitment atau performance appraisal.
9. Menganalisis digital platform bargaining pada UMKM.
10. Mengembangkan indeks dignified public service berdasarkan respect, clarity, privacy, time, dan appeal.
11. Mengukur housing affordability dan access-to-jobs pada kota besar Indonesia.
12. Menguji pengaruh transport accessibility terhadap career mobility.
13. Menganalisis just transition readiness pada daerah batubara.
14. Mengukur intergenerational mobility melalui pendidikan serta pekerjaan.
15. Mengembangkan model inclusive digital transformation pada UMKM.
16. Menganalisis asset-building dan financial security pada kelas menengah.
17. Menguji peran organizational justice terhadap productivity dan innovation.
18. Mengembangkan model fiscal fairness perception dan tax morale.
19. Menganalisis recognition justice pada kebijakan pembangunan wilayah adat atau pesisir.
20. Mengintegrasikan PLS-SEM, multilevel modelling, dan qualitative case study untuk kajian keadilan ekonomi.

Glossarium

Keadilan ekonomi: Tatanan ekonomi yang membagi manfaat, kesempatan, hak, dan beban melalui proses yang dianggap wajar serta menghormati manusia.

Keadilan distributif: Keadilan mengenai pembagian pendapatan, kekayaan, layanan, peluang, dan beban.

Keadilan prosedural: Keadilan mengenai cara keputusan dibuat: transparansi, konsistensi, voice, alasan, dan banding.

Keadilan kesempatan: Keadilan yang menilai apakah kondisi awal di luar kendali individu terlalu menentukan hasil.

Keadilan pengakuan: Keadilan yang mengakui identitas, pengalaman, pengetahuan, dan martabat kelompok yang berbeda.

Keadilan antar-generasi: Keadilan antara generasi sekarang dan generasi masa depan.

Martabat: Nilai intrinsik manusia yang menuntut penghormatan, agency, non-diskriminasi, dan perlakuan manusiawi.

Kapabilitas: Kebebasan substantif seseorang untuk melakukan dan menjadi hal yang dianggap bernilai.

PDB: Produk Domestik Bruto, ukuran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi.

Produktivitas: Output yang dihasilkan per unit input.

Kemiskinan: Kondisi keterbatasan sumber daya relatif terhadap standar minimum.

Kerentanan: Risiko mengalami penurunan kesejahteraan atau jatuh miskin setelah shock.

Gini Ratio: Ukuran statistik ketimpangan distribusi.

Bottom 40 percent: Empat puluh persen penduduk dengan pendapatan atau pengeluaran terendah.

Kelas menengah: Kelompok dengan daya beli dan keamanan ekonomi lebih tinggi daripada kelompok rentan, namun definisinya bervariasi.

Mobilitas sosial: Perubahan posisi sosial-ekonomi individu atau keluarga sepanjang waktu.

Equality of opportunity: Kesetaraan kesempatan untuk berkembang tanpa dominasi faktor kelahiran.

Decent work: Pekerjaan produktif dengan hak, perlindungan, upah wajar, keselamatan, dan martabat.

Labor share: Porsi pendapatan ekonomi yang diterima tenaga kerja.

Informalitas: Aktivitas kerja atau usaha di luar sebagian sistem formal hukum, pajak, atau perlindungan.

Predistribution: Kebijakan yang membentuk distribusi pendapatan sebelum pajak dan transfer.

Redistribution: Kebijakan pajak, transfer, dan layanan yang mengubah distribusi hasil pasar.

Social wage: Nilai ekonomi layanan publik yang meningkatkan pendapatan efektif rumah tangga.

Universal basic services: Akses luas pada layanan dasar bermutu seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, air, dan konektivitas.

Adaptive social protection: Perlindungan sosial yang dapat menyesuaikan diri terhadap shock dan perubahan kondisi.

Asset-building: Strategi membantu rumah tangga membangun rumah, tabungan, pensiun, atau aset usaha.

Land value capture: Pengambilan kembali sebagian kenaikan nilai tanah yang timbul akibat investasi publik.

Just transition: Transisi ekonomi rendah karbon yang adil bagi pekerja serta komunitas terdampak.

Algorithmic fairness: Prinsip agar sistem algoritmik tidak menghasilkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.

Recognition justice: Pendekatan yang menekankan pengakuan setara terhadap identitas dan pengalaman.

Tax morale: Kesiediaan intrinsik warga membayar pajak yang dipengaruhi trust dan fairness.

Social contract: Kesepakatan institusional mengenai hak, kewajiban, kontribusi, dan perlindungan antara warga dan negara.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail. Crown.

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488-1542.
<https://doi.org/10.1257/aer.20160696>
- Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674287013>
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2003). Inequality and growth: What can the data say? *Journal of Economic Growth*, 8, 267-299. <https://doi.org/10.1023/A:1026205114860>
- Bourguignon, F. (2004). The poverty-growth-inequality triangle. ICRIER.
- Chetty, R., Hendren, N., Kline, P., & Saez, E. (2014). Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553-1623.
<https://doi.org/10.1093/qje/qju022>
- Deaton, A. (2013). *The great escape*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400847969>
- Fields, G. S. (2012). *Working hard, working poor*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199794645.001.0001>
- Fraser, N. (2000). Rethinking recognition. *New Left Review*, 3, 107-120.
- International Labour Organization. (1999). *Decent work*. Report of the Director-General, International Labour Conference, 87th Session.
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
- Kanbur, R., & Venables, A. J. (Eds.). (2005). *Spatial inequality and development*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0199278636.001.0001>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099-1104.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)71146-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)71146-6)
- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>
- OECD. (2018). *A broken social elevator? How to promote social mobility*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264301085-en>
- OECD. (2021). *Does inequality matter?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3023ed40-en>
- Ostry, J. D., Berg, A., & Tsangarides, C. G. (2014). *Redistribution, inequality, and growth*. IMF Staff Discussion Note.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803-1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1-33.
<https://doi.org/10.1007/s10887-015-9122-3>

- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality. W. W. Norton.
- World Bank. (2016). Indonesia's rising divide. World Bank.
- World Bank. (2020). World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- World Bank. (2022). Charting a course towards universal social protection. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1935-5>
- World Bank. (2023). Indonesia poverty assessment: Pathways towards economic security. World Bank.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Catatan Data Mutakhir Indonesia 2025-2026

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi daripada 5,03 persen pada 2024. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang sekitar 57,24 persen terhadap struktur ekonomi nasional, menandakan aglomerasi kuat sekaligus tantangan pemerataan spasial.

Pada September 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perkotaan 6,60 persen, sedangkan kemiskinan perdesaan 10,72 persen.

Gini Ratio pengeluaran pada September 2025 tercatat 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Pangsa pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 19,28 persen.

Data tersebut memberikan dasar optimisme, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keadilan ekonomi telah tercapai. Ukuran pekerjaan, kekayaan, layanan, biaya hidup, mobilitas sosial, prosedural fairness, dan martabat perlu melengkapi indikator makro.

Penutup Reflektif

Ekonomi yang berkeadilan bukan ekonomi tanpa perbedaan. Ia adalah ekonomi di mana perbedaan tidak berubah menjadi penghalang permanen terhadap kesempatan, dan di mana kekuasaan ekonomi tidak membeli hak yang seharusnya dimiliki semua warga.

Martabat rakyat mengingatkan bahwa pembangunan bukan proses mengelola angka, melainkan mengelola kehidupan manusia. Di balik statistik tenaga kerja terdapat orang yang ingin dihargai; di balik angka

kemiskinan terdapat keluarga yang ingin aman; di balik indikator pendidikan terdapat anak yang ingin memiliki masa depan.

Pertumbuhan tetap harus dikejar karena kemiskinan tidak dapat dihapus dengan membagi stagnasi. Namun pertumbuhan harus dikawal agar produktivitas berubah menjadi upah, investasi berubah menjadi pekerjaan, dan kekayaan negara berubah menjadi kesempatan.

Pemerataan yang produktif tidak memusuhi usaha atau laba. Ia memastikan competition fair, pekerja memiliki hak, supplier kecil memiliki kesempatan, dan pajak membiayai public goods yang membuat pasar bekerja lebih baik.

Negara berkeadilan tidak memperlakukan bantuan sebagai kemurahan hati penguasa. Social protection adalah instrumen hak sosial dan resilience yang dikelola dengan aturan jelas serta menghormati penerima.

Pelayanan publik adalah arena martabat sehari-hari. Warga merasakan negara melalui antrean, petugas, aplikasi, sekolah, rumah sakit, jalan, serta mekanisme complaint. Reformasi kecil pada pengalaman layanan dapat memiliki nilai moral besar.

Pekerjaan layak adalah jembatan paling kuat antara ekonomi dan martabat. Upah penting, tetapi keselamatan, jam kerja, voice, kesempatan berkembang, dan penghormatan tidak kalah penting.

Perusahaan masa depan akan dinilai tidak hanya dari laba dan teknologi, tetapi dari bagaimana mereka memperlakukan manusia, data, supplier, komunitas, dan lingkungan.

AI dapat membantu pekerja menjadi lebih produktif, tetapi dapat pula membuat keputusan semakin jauh dari manusia. Human oversight dan hak banding menjadi prinsip keadilan digital.

Ekonomi hijau mengingatkan bahwa martabat generasi mendatang juga penting. Pembangunan yang menghabiskan air, tanah, hutan, dan iklim untuk keuntungan singkat memindahkan ketidakadilan ke masa depan.

Indonesia memiliki kekuatan besar dalam demografi, sumber daya, pasar, budaya gotong royong, dan institusi demokrasi. Tantangannya adalah mengubah kekuatan itu menjadi kemampuan yang tersebar.

Pemerataan wilayah tidak berarti semua daerah sama. Ia berarti setiap orang, di mana pun lahir, memiliki jalur masuk ke pendidikan, kesehatan, pasar, hukum, dan mobilitas.

Keadilan ekonomi juga bukan sekadar agenda pemerintah. Bisnis, kampus, masyarakat sipil, serikat pekerja, komunitas adat, dan keluarga semuanya membentuk distribusi kesempatan.

Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab khusus karena ilmu dapat memperkuat atau menantang struktur yang tidak adil. Riset harus membantu membedakan persepsi dari fakta serta menguji kebijakan secara terbuka.

IBM ASMI dapat berkontribusi melalui pendidikan manajer yang memahami bahwa efisiensi dan fairness bukan lawan. Organisasi yang dipercaya sering lebih produktif karena pekerja, pelanggan, dan mitra bersedia bekerja sama.

Pada akhirnya, negara berpendapatan tinggi yang tidak bermartabat tetap belum menyelesaikan tujuan pembangunan. Kemajuan ekonomi harus membuat warga bukan hanya lebih kaya, tetapi lebih bebas dari rasa takut, lebih dihargai, dan lebih mampu menentukan hidup.

Indonesia Emas 2045 seharusnya menjadi masyarakat di mana seorang anak tidak perlu lahir dari keluarga kaya atau kota besar untuk memiliki peluang, seorang pekerja tidak harus memilih antara keselamatan dan pendapatan, dan seorang warga tidak membutuhkan koneksi untuk memperoleh hak.

Jika pertumbuhan menciptakan nilai, pemerataan memperluas manfaat, dan martabat mengarahkan tujuan, pembangunan memperoleh tiga fondasi sekaligus: dinamika, keadilan, dan legitimasi.

Ekonomi seperti itulah yang layak disebut berkeadilan: ekonomi yang semakin produktif sekaligus semakin manusiawi.

Tujuan akhirnya bukan hanya membesarkan ekonomi Indonesia, tetapi memastikan bahwa ekonomi Indonesia ikut membesarkan manusia Indonesia.

Catatan Penulis

Artikel ini disusun untuk kepentingan pengajaran, diskusi akademik, dan pengembangan kebijakan pada Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI). Data mutakhir dalam naskah merujuk pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik yang tersedia hingga Agustus 2026.

Pendalaman Kebijakan dan Kelembagaan

A. Pertumbuhan yang Berorientasi pada Kualitas Pekerjaan

Agenda pertumbuhan berkeadilan perlu menempatkan kualitas pekerjaan sebagai sasaran eksplisit. Dalam banyak perdebatan, penciptaan lapangan kerja dihitung secara kuantitatif, padahal dua pekerjaan dapat memiliki nilai kesejahteraan yang sangat berbeda. Pekerjaan dengan upah rendah, jam kerja panjang, tidak aman, tanpa perlindungan, dan tanpa prospek tidak memberikan mobilitas yang sama dengan pekerjaan yang memberikan pelatihan, keselamatan, serta jalur karier. Karena itu, kebijakan investasi dan industri sebaiknya melaporkan bukan hanya jumlah pekerja yang diserap, tetapi juga median wage, proporsi formal, turnover, kecelakaan kerja, training, serta kesempatan promosi.

Perusahaan yang produktif cenderung memiliki ruang lebih besar untuk memperbaiki kualitas kerja, tetapi tidak otomatis melakukannya. Competition, labor institutions, reputasi, serta bargaining pekerja memengaruhi bagaimana productivity gain dibagi. Kebijakan yang mendorong upgrading perusahaan, technology diffusion, dan management improvement perlu dipadukan dengan standard ketenagakerjaan yang dapat ditegakkan.

Pemerintah dapat mengembangkan quality-of-jobs dashboard per sektor dan wilayah. Informasi ini membantu siswa memilih pendidikan, investor memahami labor market, dan pemerintah menargetkan reskilling. Dengan demikian, job-rich growth tidak berarti memperbanyak pekerjaan apa pun, tetapi memperluas pekerjaan yang memberi kehidupan layak serta masa depan.

B. Martabat dalam Kebijakan Upah

Upah adalah harga tenaga kerja sekaligus sumber utama kehidupan rumah tangga. Karena itu, perdebatan upah tidak dapat hanya diposisikan sebagai konflik antara biaya perusahaan dan tuntutan pekerja. Upah berkaitan dengan produktivitas, daya beli, stabilitas keluarga, dan rasa penghargaan. Kebijakan yang baik mencari titik di mana wage floor melindungi pekerja tanpa mendorong perusahaan keluar dari formalitas atau menghambat entry pekerjaan.

Minimum wage tetap memiliki fungsi, tetapi wage progression lebih penting untuk mobilitas. Pekerja perlu melihat bahwa pengalaman, skill, dan produktivitas dapat menghasilkan kenaikan pendapatan. Sistem yang membayar hampir sama pada entry dan pekerja berpengalaman menciptakan stagnasi serta turnover.

Transparansi struktur upah dapat membantu mengurangi diskriminasi yang tidak dapat dijelaskan. Namun keterbukaan perlu disesuaikan dengan konteks perusahaan. Yang lebih penting adalah memastikan criteria promotion dan compensation dapat dipahami.

Living wage dapat menjadi benchmark sukarela atau kebijakan sektoral dengan hati-hati. Konsep ini memperhitungkan biaya hidup minimum yang bermartabat, tetapi penerapannya perlu memperhatikan produktivitas dan variasi wilayah. Martabat tidak diperoleh dari angka nominal semata, tetapi dari kemampuan upah memenuhi kebutuhan dasar, memungkinkan tabungan, dan memberi ruang bagi keluarga merencanakan masa depan.

C. Kelas Menengah sebagai Infrastruktur Sosial Ekonomi

Kelas menengah yang luas berperan sebagai penyangga ekonomi karena memiliki konsumsi lebih stabil, kapasitas menabung, membayar pajak, dan berinvestasi pada pendidikan. Namun kelas menengah bukan kelompok yang otomatis aman. Rumah tangga dengan pendapatan relatif baik dapat memiliki housing debt, biaya pendidikan, kesehatan, atau transportasi yang tinggi sehingga sedikit shock mengganggu keseimbangan.

Kebijakan kelas menengah tidak seharusnya berbentuk subsidi konsumsi massal. Lebih penting adalah menjaga affordable housing, layanan kesehatan yang dipercaya, sekolah bermutu, transportasi publik, stabilitas harga, perlindungan konsumen, dan pasar kerja yang menyediakan career ladder.

Asset-building menjadi sangat penting. Rumah, pensiun, tabungan, dan kepemilikan usaha memberi buffer serta sumber pendapatan masa depan. Program financial inclusion perlu diukur dari net assets, bukan jumlah rekening atau kredit.

Kelas menengah yang merasa aman juga memiliki kemampuan lebih besar untuk mengambil risiko entrepreneur, pindah pekerjaan, atau melanjutkan pendidikan. Dengan demikian, economic security bukan lawan dynamism. Ia justru dapat memperkuat inovasi karena rumah tangga tidak dipaksa menghindari semua risiko.

D. Martabat dalam Pelayanan Publik

Bagi sebagian besar warga, martabat negara terasa melalui pengalaman konkret di sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor administrasi, transportasi, dan kanal digital. Pelayanan yang lambat, tidak jelas, diskriminatif, atau menuntut koneksi dapat merusak rasa keadilan lebih dalam daripada nominal anggaran.

Standar pelayanan perlu mencakup respect, clarity, privacy, timeliness, accessibility, dan appeal. Pemerintah dapat mengukur citizen experience sebagaimana perusahaan mengukur customer experience, tetapi dengan kesadaran bahwa warga bukan sekadar pelanggan; mereka memiliki hak.

Digitalisasi dapat memperbaiki pengalaman dengan mengurangi antrean dan tatap muka yang tidak perlu. Namun aplikasi yang rumit atau error tanpa alternatif justru memperbesar exclusion. Human-assisted channel tetap penting bagi lansia, penyandang disabilitas, atau warga dengan literasi digital rendah.

Pelayanan bermartabat juga menuntut petugas diperlakukan baik. Frontline worker yang kelelahan dan tidak mendapat dukungan sulit memberi layanan berkualitas. Reformasi pengalaman warga harus disertai perbaikan staffing, training, system, dan accountability.

E. Perumahan, Kepemilikan Aset, dan Harga Tanah

Perumahan memiliki posisi unik karena merupakan tempat tinggal, aset, collateral, serta sumber wealth transfer antar-generasi. Ketika harga rumah di lokasi produktif meningkat jauh lebih cepat daripada upah, generasi muda dan non-pemilik menghadapi hambatan masuk yang semakin besar.

Kebijakan perumahan perlu memperluas supply melalui zoning yang memungkinkan density, infrastructure, permitting, dan penggunaan tanah publik secara transparan. Subsidi kredit tanpa tambahan supply dapat mendorong harga naik.

Rental housing berkualitas juga penting. Mobilitas kerja sering membutuhkan fleksibilitas sewa, terutama bagi pekerja muda dan migran. Pasar sewa yang aman, dengan kontrak jelas dan standard minimum, dapat menjadi bagian housing policy.

Land value capture memberi cara mengembalikan sebagian kenaikan nilai tanah akibat investasi publik untuk membiayai transit, ruang publik, dan affordable housing. Prinsipnya sederhana: nilai yang diciptakan masyarakat melalui infrastruktur tidak seluruhnya harus menjadi windfall privat.

Martabat dalam perumahan berarti hunian aman, tidak overcrowded, memiliki air serta sanitasi, dan berada pada lokasi yang tidak memutus akses terhadap pekerjaan serta komunitas.

F. Transportasi dan Keadilan Waktu

Waktu adalah sumber daya yang tidak dapat disimpan. Pekerja berpendapatan rendah sering menghabiskan waktu lebih lama untuk perjalanan karena tidak mampu tinggal dekat pusat pekerjaan atau membeli kendaraan. Karena itu, ketimpangan transportasi juga merupakan ketimpangan waktu.

Transportasi publik yang cepat, aman, dan terintegrasi memperluas access-to-jobs. Efeknya mirip peningkatan kesempatan kerja tanpa harus memindahkan perusahaan. Tarif terjangkau penting, tetapi reliability dan frequency sering lebih menentukan.

Perencanaan transportasi perlu menghindari bias hanya pada kendaraan pribadi. Jalan baru dapat mengurangi kemacetan sementara namun memicu induced demand. Investasi transit, walking, dan cycling memiliki manfaat kesehatan serta lingkungan.

Martabat transportasi mencakup keamanan perempuan, akses disabilitas, kualitas halte, informasi, serta kepastian layanan. Sistem yang membuat penumpang menunggu tanpa informasi adalah bentuk biaya yang sering tidak dihitung.

Kota berkeadilan memandang mobility sebagai capability: kemampuan warga bergerak menuju pekerjaan, pendidikan, health, dan hubungan sosial dengan biaya yang wajar.

G. Pendidikan sebagai Mesin Keadilan Antar-Generasi

Pendidikan merupakan salah satu mekanisme paling kuat untuk memutus hubungan antara kondisi keluarga dan hasil anak. Namun akses formal ke sekolah tidak cukup jika kualitas berbeda tajam. Anak yang berada di sekolah dengan guru lemah, fasilitas minim, dan lingkungan belajar buruk tetap memiliki opportunity gap.

Investasi early childhood, literacy, numeracy, teacher quality, school leadership, dan assessment perlu menjadi prioritas. Teknologi pendidikan dapat membantu, tetapi tidak menggantikan guru serta lingkungan belajar yang aman.

Perguruan tinggi perlu memperluas access sambil menjaga kualitas. Beasiswa berbasis kebutuhan dan potensi lebih adil daripada subsidi umum yang banyak dinikmati keluarga mampu.

Pendidikan vokasi harus memiliki jalur progression. Lulusan tidak boleh terjebak pada skill yang hanya relevan beberapa tahun. Fundamental literacy, digital skill, problem solving, dan adaptability perlu melengkapi technical skill.

Martabat pendidikan juga berarti siswa dihargai sebagai individu, tidak dipermalukan karena kemiskinan, disabilitas, atau latar budaya. Institusi pendidikan membentuk rasa diri sekaligus skill.

H. Kesehatan sebagai Hak dan Modal Produktif

Kesehatan adalah prasyarat untuk bekerja, belajar, dan berpartisipasi. Rumah tangga yang menghadapi penyakit serius dapat kehilangan pendapatan sekaligus mengeluarkan biaya besar, menciptakan downward mobility. Sistem kesehatan yang adil mengurangi risiko tersebut melalui coverage, primary care, obat, referral, dan kualitas layanan.

Universal coverage harus dibaca bersama availability. Kartu jaminan tidak cukup jika fasilitas terlalu jauh, waktu tunggu ekstrem, atau tenaga kesehatan tidak tersedia. Equity memerlukan distribusi supply.

Pengalaman pasien memiliki dimensi martabat: informed consent, privacy, komunikasi, pain management, dan respect. Kualitas klinis dan kualitas pengalaman saling melengkapi.

Preventive care memiliki manfaat distribusi besar karena kelompok miskin sering menunda pengobatan hingga penyakit berat. Screening, immunization, gizi, dan health education menurunkan beban jangka panjang.

Kesehatan lingkungan juga penting. Polusi udara, air, panas, dan sanitasi buruk sering lebih banyak menimpa kelompok berpendapatan rendah. Environmental health adalah bagian keadilan ekonomi.

I. Perlindungan Sosial yang Tidak Menstigma

Perlindungan sosial diperlukan karena pasar tidak dapat menjamin setiap rumah tangga bebas dari shock. Pengangguran, bencana, sakit, disabilitas, dan siklus hidup menciptakan risiko yang sulit ditanggung sendiri. Program yang baik menjaga konsumsi minimum serta mencegah keluarga menjual aset produktif atau menarik anak dari sekolah.

Namun desain targeted assistance dapat menciptakan stigma bila penerima dipandang sebagai beban. Bahasa, prosedur, dan komunikasi perlu menegaskan bahwa bantuan merupakan bagian social contract dan dibatasi oleh aturan, bukan kemurahan hati personal.

Dynamic registry dan digital payment dapat meningkatkan kecepatan, tetapi warga harus memiliki jalur memperbarui data dan mengajukan keberatan. Kesalahan sistem tidak boleh membuat rumah tangga kehilangan hak tanpa penjelasan.

Graduasi perlu bertahap. Jika seluruh manfaat hilang segera ketika pendapatan sedikit naik, rumah tangga menghadapi benefit cliff yang mengurangi insentif formalitas.

Perlindungan sosial bermartabat memberi rasa aman tanpa mengurangi agency. Tujuan akhirnya adalah resilience dan mobility, bukan ketergantungan.

J. Pajak yang Adil dan Dapat Dipercaya

Pajak mencerminkan hubungan antara individu dan masyarakat. Sistem pajak yang dianggap adil memudahkan pemerintah membiayai layanan dan investasi. Ketika warga melihat privilege atau penghindaran oleh kelompok kuat, tax morale dapat menurun.

Progressivity perlu dilihat secara keseluruhan. Pajak penghasilan dapat progresif, tetapi pajak konsumsi luas. Pengeluaran publik yang pro-poor dapat mengoreksi. Analisis incidence harus mencakup kedua sisi.

Property tax memiliki potensi sebagai sumber lokal dan alat menangkap nilai lokasi. Namun valuasi yang tidak akurat dan administrasi lemah dapat menimbulkan ketidakadilan. Perlindungan untuk household cash-poor asset-rich seperti lansia dapat diperlukan.

Tax expenditure harus transparan karena merupakan pengeluaran melalui sistem pajak. Insentif yang tidak dievaluasi dapat menghasilkan transfer besar kepada kelompok atau sektor tanpa manfaat publik sepadan.

Martabat pajak juga menyangkut layanan administrasi. Wajib pajak berhak memperoleh aturan jelas, proses sederhana, dan appeal ketika berselisih.

K. Hilirisasi dan Keadilan Lokal

Hilirisasi dapat menjadi alat transformasi karena mengubah sumber daya menjadi nilai tambah, pekerjaan, dan learning. Namun proyek besar dapat membentuk enclave bila input, tenaga ahli, dan jasa utama datang dari luar sementara daerah menanggung polusi, tekanan perumahan, dan perubahan sosial.

Local linkage perlu dibangun secara realistis melalui supplier mapping, training, vocational center, housing, health, dan infrastructure. Target local content tanpa capability dapat hanya menaikkan biaya atau menciptakan perantara.

Revenue dari sumber daya perlu digunakan untuk aset yang bertahan setelah tambang atau boom berakhir. Pendidikan, diversifikasi, dan ecological restoration adalah bentuk keadilan antargenerasi.

Community engagement perlu dilakukan sebelum keputusan final. Kompensasi finansial tidak selalu mengganti kehilangan tanah, budaya, atau mata pencaharian.

Hilirisasi yang bermartabat berarti pekerja memiliki safety dan career, komunitas memperoleh manfaat jangka panjang, dan lingkungan dipulihkan.

L. AI, Otomatisasi, dan Martabat Kerja

AI mengubah pembagian tugas antara manusia dan mesin. Dalam sebagian pekerjaan, AI dapat meningkatkan produktivitas pekerja; dalam pekerjaan lain, tugas dapat diotomatisasi. Keadilan bergantung pada siapa memperoleh productivity gain dan apakah pekerja memiliki kesempatan belajar.

Perusahaan sebaiknya menggunakan transition planning sebelum automation besar: task mapping, reskilling, redeployment, dan communication. Pemutusan mendadak ketika alternatif internal tersedia dapat merusak trust.

AI juga digunakan untuk hiring, performance monitoring, dan scheduling. Sistem semacam ini dapat mengurangi bias tertentu tetapi juga menciptakan opacity. Pekerja perlu mengetahui penggunaan data, criteria, dan hak review.

Excessive surveillance mengurangi martabat meski meningkatkan monitoring. Productivity system perlu mempertahankan reasonable privacy dan autonomy.

Pemerintah perlu membangun lifelong learning serta portable benefits karena career akan semakin berubah. Tujuannya bukan mempertahankan setiap job task, tetapi menjaga manusia dapat berpindah dengan aman.

M. Ekonomi Hijau dan Keadilan Lingkungan

Transisi hijau dapat memperbaiki kesehatan dan mengurangi risiko iklim, tetapi biaya awal tidak selalu terbagi merata. Carbon pricing dapat menaikkan harga energi; standard kendaraan dapat meningkatkan harga; penutupan tambang mengurangi pekerjaan lokal.

Revenue recycling serta targeted assistance dapat membuat kebijakan iklim progresif. Investasi transportasi publik dan efficiency household memberi manfaat jangka panjang.

Environmental justice juga menuntut pengurangan polusi pada komunitas yang selama ini menanggung beban industri. Clean air dan safe water adalah hak dasar, bukan luxury.

Renewable project tetap memerlukan land, mineral, dan grid. Label hijau tidak menghapus conflict. Free, prior, and informed participation pada konteks yang relevan serta benefit-sharing memperkuat legitimacy.

Martabat generasi mendatang berarti tidak menggunakan seluruh ecological space sekarang. Keadilan iklim adalah hubungan antara kelompok saat ini dan masa depan.

N. Desentralisasi, Martabat Daerah, dan Kapasitas Negara

Indonesia adalah negara besar dan beragam. Desentralisasi memberi ruang penyesuaian lokal dan partisipasi, tetapi perbedaan kapasitas dapat menciptakan ketimpangan hak. Warga di daerah lemah tidak seharusnya menerima layanan jauh lebih buruk hanya karena administrasinya kurang mampu.

Pemerintah pusat perlu menetapkan national minimum service standards serta equalization financing. Daerah memiliki fleksibilitas dalam cara mencapai standard.

Capacity building harus praktis: procurement, data, planning, HR, asset management, maintenance, dan revenue. Training satu kali tanpa perubahan system memiliki dampak kecil.

Martabat daerah juga berarti kebijakan pusat tidak memperlakukan daerah hanya sebagai lokasi ekstraksi atau penerima instruksi. Pengetahuan lokal perlu masuk keputusan.

Kolaborasi antardaerah penting untuk DAS, transportasi, metropolitan, dan rantai nilai. Keadilan wilayah membutuhkan network, bukan isolasi.

O. Martabat sebagai Indikator Pembangunan

Martabat sulit diukur karena bersifat normatif dan pengalaman. Namun kesulitan pengukuran bukan alasan mengabaikan. Indikator dapat dikembangkan melalui pengalaman layanan, workplace respect, discrimination, voice, harassment, access appeal, privacy, dan sense of control.

Survey subjective perlu dipadukan dengan indikator objektif. Warga dapat melaporkan perlakuan buruk meski waktu layanan singkat; keduanya memberi informasi berbeda.

Dignity dashboard tidak harus menghasilkan satu skor nasional. Lebih baik beberapa indikator pada health, social assistance, labor, justice, dan digital services.

Pengukuran juga perlu mencegah performative compliance. Organisasi dapat mengejar skor survey tanpa memperbaiki kultur. Audit kualitatif dan complaint data membantu.

Memasukkan martabat ke indikator memberi pesan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya tentang apa yang diberikan, tetapi bagaimana manusia diperlakukan dalam proses.

Tiga Puluh Indikator Ekonomi Berkeadilan

1. Pertumbuhan PDB riil dan produktivitas total faktor.
2. Median real household income atau expenditure.
3. Pertumbuhan konsumsi 40 persen terbawah.
4. Tingkat kemiskinan dan near-poor.
5. Gini Ratio pengeluaran dan indikator kekayaan.
6. Upah riil median.
7. Proporsi pekerjaan formal.
8. Proporsi pekerja dengan jaminan sosial.
9. Tingkat kecelakaan kerja dan keselamatan.
10. Wage progression menurut pengalaman dan skill.

11. Labor share pada sektor utama.
12. Proporsi UMKM yang naik kelas.
13. Kepemilikan rumah yang affordable.
14. Beban biaya perumahan terhadap pendapatan.
15. Coverage pensiun dan tabungan.
16. Debt service ratio rumah tangga.
17. Learning outcome menurut kuintil dan wilayah.
18. Akses PAUD berkualitas.
19. Out-of-pocket health expenditure.
20. Waktu tempuh rumah-ke-pekerjaan.
21. Akses transportasi publik aman.
22. Partisipasi kerja perempuan.
23. Youth NEET dan school-to-work transition.
24. Employment gap penyandang disabilitas.
25. PDRB per kapita antarwilayah dan gap layanan.
26. Citizen trust dan fairness perception.
27. Persentase keputusan publik yang memiliki appeal channel.
28. Experience score pelayanan publik tanpa stigma.
29. Indikator natural capital dan environmental exposure.
30. Intergenerational mobility pendidikan dan pendapatan.

Agenda Seratus Hari untuk Ekonomi Berkeadilan

1. Membentuk dashboard nasional Growth-Justice-Dignity.
2. Menetapkan baseline kualitas pekerjaan, upah riil, formalitas, dan workplace safety.
3. Memetakan near-poor, kelas menengah rentan, dan housing burden.
4. Meninjau lima subsidi terbesar dari sisi distribusi dan martabat layanan.
5. Mengembangkan citizen experience standard untuk layanan sosial utama.
6. Menetapkan mekanisme appeal minimum pada sistem bantuan digital.
7. Memilih lima cluster industri untuk pilot supplier dan local job inclusion.
8. Membentuk task force perumahan-transit pada kota dengan housing burden tinggi.
9. Memperkuat childcare pilot di kawasan kerja padat.
10. Mengembangkan reskilling protocol untuk proyek otomasi besar.
11. Menetapkan disclosure penggunaan AI pada keputusan kerja dan layanan publik berisiko tinggi.

12. Memilih tiga daerah transisi energi untuk just transition plan.
13. Membangun pilot pension inclusion pekerja informal.
14. Mengembangkan indeks kualitas layanan dasar antarwilayah.
15. Menerbitkan analisis distributional impact untuk reformasi fiskal utama.
16. Mengembangkan model land value capture untuk koridor transit.
17. Membuka forum generasi muda tentang mobility dan cost of living.
18. Membangun program disability-inclusive employment pada BUMN dan korporasi mitra.
19. Menyusun annual report martabat dalam pelayanan publik.
20. Mengintegrasikan indikator mobility ke evaluasi RPJMN.

Penutup Besar: Keadilan sebagai Kekuatan Pembangunan

Keadilan ekonomi sering dipahami sebagai batas terhadap efisiensi. Pandangan ini terlalu sempit. Banyak bentuk ketidakadilan justru merupakan pemborosan ekonomi: anak berbakat yang tidak memperoleh sekolah bermutu, pekerja yang tidak dapat berkembang karena diskriminasi, UMKM yang kehilangan pasar karena koneksi, atau kota yang membuat pekerja menghabiskan berjam-jam di jalan.

Ketika hambatan tersebut dikurangi, output potensial meningkat. Keadilan kesempatan memperbesar talent pool; pelayanan yang dapat dipercaya mengurangi biaya transaksi; competition mengurangi rente; health dan education meningkatkan produktivitas.

Martabat menambah dimensi yang tidak dapat diganti oleh transfer. Masyarakat tidak hanya ingin menerima manfaat, tetapi ingin dihormati sebagai warga, pekerja, pasien, pelanggan, dan anggota komunitas.

Negara yang menghormati martabat memberi alasan, membuka banding, melindungi privasi, mencegah penghinaan, dan tidak membuat hak bergantung pada patron. Ini adalah aspek sehari-hari dari rule of law.

Bisnis yang menghormati martabat tidak berarti mengabaikan performance. Justru kejelasan, fairness, safety, dan voice dapat meningkatkan engagement serta innovation.

Keadilan juga menuntut disiplin fiskal karena inflasi, krisis utang, atau layanan yang runtuh paling merugikan kelompok dengan buffer kecil. Program sosial harus sustainable agar hak tidak bergantung pada boom sementara.

Pemerataan bukan menyebarkan proyek secara merata. Ia membangun jalur kesempatan yang realistis sesuai karakter wilayah: kota, desa, pulau, kawasan industri, pertanian, atau pesisir.

Teknologi bukan otomatis inklusif. Platform, AI, dan data dapat memperluas akses sekaligus menciptakan konsentrasi baru. Governance menentukan arah.

Ekonomi hijau juga bukan otomatis adil. Pekerja, daerah, masyarakat adat, dan generasi mendatang harus menjadi bagian desain.

Kelas menengah yang aman menjadi indikator penting karena menunjukkan masyarakat telah bergerak dari survival menuju planning. Namun kelas menengah perlu aset serta layanan, bukan hanya konsumsi.

Perlindungan sosial menjaga lantai; pendidikan, pekerjaan, dan aset membangun tangga. Negara berkeadilan membutuhkan keduanya.

Indonesia memiliki tradisi gotong royong serta prinsip keadilan sosial yang dapat memberi landasan budaya bagi agenda ini. Namun nilai harus diterjemahkan ke institusi, anggaran, dan standar pelayanan.

Pada 2045, keberhasilan seharusnya terlihat pada mobilitas: semakin banyak anak yang hasil hidupnya tidak ditentukan oleh keluarga, lokasi, gender, atau koneksi.

Keberhasilan juga terlihat ketika pekerja dapat menyampaikan masalah tanpa takut, pasien diperlakukan hormat, penerima bantuan tidak distigma, dan pelaku usaha tidak memerlukan patron.

Pertumbuhan ekonomi memberi sumber daya untuk mencapai keadaan itu. Pemerataan memastikan sumber daya tidak hanya mengalir ke yang sudah kuat. Martabat memastikan cara mencapainya tetap manusiawi.

Tiga unsur tersebut membentuk agenda pembangunan yang utuh. Menghapus salah satunya akan menghasilkan ekonomi yang pincang: adil tetapi stagnan, tumbuh tetapi terbelah, atau efisien tetapi tidak manusiawi.

Indonesia mempunyai peluang membangun model yang menggabungkan ketiganya dengan memanfaatkan investasi, digitalisasi, hilirisasi, demografi, dan reformasi layanan.

Yang diperlukan adalah konsistensi dalam mengukur outcome, keberanian mengevaluasi kebijakan, dan kesediaan mendengar warga yang menanggung dampak.

Pada akhirnya, ekonomi berkeadilan bukan proyek selesai. Ia merupakan proses terus-menerus menyesuaikan institusi ketika teknologi, pasar, dan masyarakat berubah.

Kompasnya tetap sederhana: apakah pertumbuhan memperluas kemampuan, apakah aturan berlaku adil, dan apakah manusia diperlakukan dengan martabat.

Jika jawabannya semakin sering ya, maka Indonesia bukan hanya semakin kaya, tetapi semakin dewasa sebagai masyarakat dan negara.

Suplemen Strategis: Agenda Keadilan Ekonomi dalam Transformasi Indonesia

A. Keadilan dalam Transformasi Industri

Transformasi industri akan memindahkan tenaga kerja, modal, dan sumber daya antar-sektor. Proses ini dapat menciptakan produktivitas tinggi, tetapi juga menghasilkan kelompok yang tertinggal. Karena itu, industrial policy perlu memasukkan social transition plan pada sektor yang mengalami perubahan besar.

Perusahaan yang menerima insentif publik dapat diminta menyusun training plan, local supplier plan, dan labor transition plan. Persyaratan tersebut tidak perlu menjadi birokrasi berat jika indikator dibuat sederhana dan berbasis outcome.

Industrial cluster perlu memiliki vocational institution, housing, transport, health, dan public space yang memadai. Kawasan produksi yang tidak menyediakan kualitas hidup akan sulit mempertahankan talenta dan dapat menciptakan segregasi.

Keadilan industri juga mencakup akses perusahaan lokal terhadap peluang. Informasi procurement, standard, dan supplier qualification harus tersedia secara transparan agar koneksi personal tidak menjadi syarat utama.

Dengan desain tersebut, transformasi industri tidak hanya memindahkan nilai tambah ke dalam negeri, tetapi juga memperluas kelas pekerja terampil, perusahaan menengah, dan kota produktif.

B. Keadilan dalam Transformasi Digital

Digitalisasi menurunkan biaya transaksi dan membuka akses, tetapi manfaatnya bergantung pada perangkat, jaringan, literasi, data, dan skill. Warga yang tidak memiliki salah satu unsur tersebut dapat tertinggal bahkan ketika layanan resmi sudah 'digital'.

Prinsip digital-by-default sebaiknya tidak berubah menjadi digital-only. Pada masa transisi, kanal bantuan manusia tetap diperlukan. Accessibility bagi penyandang disabilitas perlu menjadi standard sejak desain.

Platform digital dapat menghubungkan UMKM dengan pasar, tetapi komisi, ranking, data access, dan self-preferencing memengaruhi bargaining. Competition policy serta transparency rules menjadi bagian keadilan ekonomi.

AI juga perlu diuji dari dampak distribusi. Produktivitas yang meningkat pada perusahaan besar dapat memperlebar gap bila UMKM tidak mendapat akses pada tools, training, atau cloud yang terjangkau.

Transformasi digital yang adil berarti teknologi memperluas kemampuan masyarakat, bukan sekadar memindahkan layanan ke layar.

C. Keadilan dalam Transformasi Hijau

Ekonomi hijau diperlukan untuk mengurangi risiko iklim dan menjaga modal alam, tetapi perubahan harga energi, standard, dan teknologi dapat membebani rumah tangga atau sektor tertentu. Keadilan transisi menuntut identifikasi kelompok terdampak sebelum kebijakan diberlakukan penuh.

Pekerja pada sektor fosil membutuhkan informasi tentang timeline, reskilling, dan peluang baru. Daerah penghasil membutuhkan sumber pendapatan pengganti serta investasi diversifikasi.

Rumah tangga berpendapatan rendah sering tidak mampu membayar investasi awal untuk panel surya, kendaraan efisien, atau renovasi rumah. Program finance dan public infrastructure perlu memastikan manfaat hijau tidak hanya dinikmati kelompok kaya.

Community participation penting pada renewable project karena tanah dan ruang sering menjadi sumber konflik. Benefit-sharing dan grievance mechanism dapat meningkatkan legitimacy.

Keadilan hijau adalah kombinasi antara climate effectiveness dan social fairness. Salah satu tanpa yang lain sulit bertahan.

D. Keadilan dalam Sistem Keuangan

Sistem keuangan berfungsi baik ketika mampu menyalurkan tabungan ke investasi produktif sambil melindungi pengguna dari risiko yang tidak dipahami. Financial inclusion yang hanya meningkatkan jumlah pinjaman dapat memperbesar kerentanan bila affordability dan consumer protection lemah.

Credit scoring digital dapat membuka akses bagi orang tanpa collateral, tetapi model harus memiliki mekanisme koreksi. Kesalahan data tidak boleh mengunci seseorang dari kredit tanpa penjelasan.

Biaya serta bunga perlu transparan dalam format yang dapat dipahami. Penagihan harus mengikuti standard yang tidak mengintimidasi atau mempermalukan.

Untuk UMKM, pembiayaan perlu disertai kemampuan manajemen. Kredit tanpa cash-flow planning dapat meningkatkan debt burden, sementara training tanpa finance juga terbatas.

Keuangan berkeadilan memberi akses, harga wajar, perlindungan, serta kesempatan membangun aset, bukan hanya kesempatan berutang.

E. Keadilan dalam Kebijakan Pangan

Pangan memiliki dimensi martabat karena kelaparan dan gizi buruk langsung membatasi kemampuan manusia. Negara perlu menjaga akses terhadap pangan bergizi, bukan hanya kalori murah.

Produsen juga memiliki hak terhadap penghidupan yang layak. Kebijakan harga harus menyeimbangkan konsumen dan petani melalui produktivitas, logistics, storage, market competition, serta risk management.

Program pangan publik dapat menggunakan procurement lokal ketika efisien, membantu petani memperoleh pasar sekaligus memperbaiki gizi. Namun quality standard harus dijaga.

Food subsidy yang tepat sasaran perlu menghindari stigma dan exclusion. Digital voucher dapat membantu, tetapi pilihan pangan dan accessibility penting.

Keadilan pangan menghubungkan harga, gizi, pertanian, lingkungan, dan martabat keluarga dalam satu sistem.

F. Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan kekayaan publik yang sering berada di wilayah komunitas tertentu. Ketika tambang, hutan, atau laut dimanfaatkan, distribusi rente dan risiko menjadi pertanyaan keadilan.

Royalty dan pajak perlu mengkompensasi penggunaan aset publik, sementara daerah dan komunitas terdampak membutuhkan manfaat nyata. Namun kompensasi tidak menggantikan hak lingkungan atau consent pada konteks yang relevan.

Rente sumber daya tak terbarukan sebaiknya diubah menjadi human capital, infrastructure, technology, dan dana masa depan. Jika seluruhnya dikonsumsi sekarang, generasi berikut menerima stok lebih kecil tanpa aset pengganti.

Transparency pada beneficial ownership, kontrak, environmental performance, dan closure obligation mengurangi risiko capture.

Pengelolaan berkeadilan memandang sumber daya sebagai amanah lintas generasi, bukan peluang rente jangka pendek.

G. Keadilan dalam Pembangunan Desa dan Pesisir

Desa dan wilayah pesisir sering memiliki biaya transportasi serta layanan lebih tinggi, tetapi juga memiliki aset alam, budaya, dan produksi yang penting. Keadilan tidak berarti menahan penduduk tetap di desa, tetapi memberi pilihan: tinggal dengan kehidupan layak atau bermigrasi secara aman.

Produktivitas desa dapat meningkat melalui agroprocessing, cold chain, tourism, renewable energy, digital service, serta akses market. Konektivitas adalah syarat utama.

Nelayan kecil membutuhkan akses pelabuhan, ice, informasi cuaca, finance, dan market. Tanpa itu, posisi tawar terhadap intermediary rendah.

Pembangunan pesisir perlu menjaga mangrove, fish stock, dan carrying capacity karena kerusakan ekologis langsung mengurangi penghidupan.

Martabat wilayah berarti masyarakat lokal dipandang sebagai partner pembangunan, bukan sekadar penerima proyek.

H. Keadilan dalam Pengadaan Publik dan Infrastruktur

Pengadaan publik merupakan salah satu cara negara membelanjakan uang rakyat. Fair procurement menuntut competition, transparency, proportional requirements, dan pembayaran tepat waktu.

Persyaratan yang terlalu kompleks dapat secara tidak sengaja mengecualikan perusahaan kecil. Paket kontrak, jaminan, dan pengalaman perlu disesuaikan dengan risiko proyek.

Prompt payment sangat penting karena cash flow UMKM sempit. Pemerintah yang terlambat membayar memindahkan biaya financing ke supplier yang paling lemah.

Pada proyek infrastruktur, community impact dan accessibility perlu dinilai. Jalan yang mempercepat perjalanan kendaraan tetapi memutus akses pejalan kaki lokal dapat menciptakan manfaat dan kerugian berbeda.

Keadilan procurement menghubungkan value for money dengan kesempatan usaha serta public accountability.

I. Keadilan dalam Penegakan Hukum Ekonomi

Kontrak, persaingan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, dan pajak hanya bermakna bila aturan dapat ditegakkan. Kelompok kuat sering memiliki sumber daya lebih besar untuk litigasi atau lobbying, sehingga state capacity penting bagi fairness.

Alternative dispute resolution dapat membantu UMKM dan konsumen menyelesaikan sengketa dengan biaya lebih rendah. Namun mekanisme harus independen dan dapat dipercaya.

Regulatory enforcement perlu risk-based tetapi tidak selective berdasarkan koneksi. Data serta publication of enforcement statistics membantu accountability.

Whistleblower protection penting bagi pekerja yang mengetahui fraud, safety violation, atau corruption. Tanpa perlindungan, informasi tetap tersembunyi.

Rule of law yang adil mengurangi biaya transaksi dan membuat merit lebih penting daripada patronage.

J. Keadilan dan Budaya Organisasi

Kebijakan nasional dapat berkeadilan tetapi pengalaman sehari-hari tetap buruk jika budaya organisasi merendahkan bawahan, menoleransi harassment, atau memberi promosi melalui koneksi. Organizational justice adalah bagian mikro dari keadilan ekonomi.

Distributive justice di organisasi membahas reward; procedural justice membahas proses; interactional justice membahas bagaimana orang diperlakukan. Ketiganya memengaruhi trust serta engagement.

Speak-up climate penting agar pekerja dapat menyampaikan masalah tanpa pembalasan. Banyak kecelakaan dan kegagalan kualitas terjadi ketika informasi buruk tidak naik ke pimpinan.

Leadership perlu memberi contoh fairness melalui keputusan konsisten, alasan yang jelas, dan kesediaan mengoreksi kesalahan.

Budaya organisasi yang bermartabat tidak menghilangkan hierarki, tetapi membuat hierarki accountable.

Lima Belas Ujian bagi Kebijakan Ekonomi Berkeadilan

1. Ujian Pertumbuhan

Apakah kebijakan meningkatkan produktivitas atau kapasitas ekonomi secara nyata? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

2. Ujian Distribusi

Siapa memperoleh manfaat terbesar dan siapa menanggung biaya? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

3. Ujian Kesempatan

Apakah kelompok dengan kondisi awal lemah memperoleh jalan untuk berpartisipasi? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

4. Ujian Pekerjaan

Apakah kebijakan menciptakan pekerjaan yang aman, produktif, dan memiliki prospek? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

5. Ujian Aset

Apakah rumah tangga mampu membangun kekayaan, bukan hanya konsumsi? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

6. Ujian Wilayah

Apakah manfaat terlalu terkonsentrasi atau menghasilkan linkage lokal? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

7. Ujian Gender

Apakah beban dan manfaat berbeda secara sistematis bagi perempuan dan laki-laki? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

8. Ujian Disabilitas

Apakah layanan dan kesempatan dapat diakses secara nyata? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

9. Ujian Prosedur

Apakah keputusan transparan, konsisten, dan dapat dibandingkan? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

10. Ujian Martabat

Apakah warga diperlakukan dengan hormat dan tidak distigma? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

11. Ujian Data

Apakah data yang digunakan akurat, dapat dikoreksi, dan aman? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

12. Ujian Persaingan

Apakah kebijakan memperkuat rente atau membuka contestability? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

13. Ujian Fiskal

Apakah manfaat sepadan dengan biaya dan berkelanjutan? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

14. Ujian Ekologi

Apakah biaya lingkungan dipindahkan ke kelompok atau masa depan? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

15. Ujian Mobilitas

Apakah kebijakan memperluas kemampuan orang untuk naik kelas? Ujian ini tidak menghasilkan satu jawaban mekanis, tetapi memaksa pengambil keputusan melihat dimensi yang sering hilang dari analisis biaya-manfaat tradisional.

Penutup Final: Martabat sebagai Ukuran Tertinggi

Ekonomi modern sangat mampu menghitung output, harga, investasi, dan transaksi. Tantangan yang lebih sulit adalah menghitung apakah kehidupan manusia benar-benar membaik dan apakah peningkatan itu diperoleh melalui cara yang adil.

Martabat menjadi ukuran tertinggi karena ia mengingatkan bahwa manusia tidak boleh direduksi menjadi angka pendapatan, unit tenaga kerja, pengguna aplikasi, atau penerima bantuan.

Seorang pekerja memiliki martabat ketika keselamatan dan suaranya dihargai. Seorang pasien memiliki martabat ketika memperoleh informasi serta penghormatan. Seorang pelaku usaha memiliki martabat ketika haknya tidak bergantung koneksi. Seorang penerima bantuan memiliki martabat ketika diperlakukan sebagai warga.

Pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya yang membuat semua itu lebih mungkin. Karena itu, pertumbuhan tidak perlu dicurigai sebagai lawan keadilan. Yang perlu dikritisi adalah pertumbuhan yang memusatkan manfaat, mengabaikan externality, atau melemahkan agency.

Pemerataan memperbaiki transmisi dari pertumbuhan ke kehidupan rakyat. Ia bekerja melalui pekerjaan, upah, harga, layanan, aset, dan wilayah.

Keadilan prosedural memperbaiki cara institusi berinteraksi dengan rakyat. Ia bekerja melalui rule of law, transparansi, appeal, dan non-diskriminasi.

Keadilan kesempatan memperbaiki titik awal. Ia bekerja melalui gizi, pendidikan, kesehatan, transportasi, digital access, dan lingkungan keluarga.

Keadilan pengakuan memastikan kelompok yang berbeda tidak dipaksa menjadi tidak terlihat. Ia bekerja melalui partisipasi, accessibility, cultural respect, dan perlindungan dari stigma.

Keadilan antargenerasi memperluas horizon moral. Ia memastikan pembangunan hari ini tidak menghabiskan modal alam, fiskal, dan sosial yang dibutuhkan generasi besok.

Semua dimensi tersebut saling terkait. Negara dapat memiliki transfer progresif tetapi pelayanan merendahkan; dapat memiliki sekolah gratis tetapi kualitas timpang; dapat memiliki investasi besar tetapi pekerjaan lokal rendah; dapat memiliki teknologi canggih tetapi data rights lemah.

Karena itu, ekonomi berkeadilan tidak dapat dibangun dengan satu kebijakan simbolik. Ia membutuhkan arsitektur institusi yang konsisten.

Indonesia memiliki modal sosial dan konstitusional untuk membangun arsitektur tersebut. Prinsip keadilan sosial dapat diterjemahkan ke dalam indikator, anggaran, standard kerja, layanan, dan mekanisme partisipasi.

Ekonomi berkeadilan juga harus dinamis. Perlindungan yang membekukan struktur tidak adil bagi generasi muda yang membutuhkan entry. Competition dan innovation tetap diperlukan.

Perusahaan harus dapat memperoleh laba, tetapi laba yang lahir dari inovasi dan efisiensi lebih legitimate daripada rente yang bergantung privilege.

Pekerja perlu perlindungan, tetapi perlindungan harus disertai skill serta mobility agar perubahan teknologi tidak berhenti.

Daerah perlu transfer, tetapi juga capability agar tidak bergantung permanen.

Rumah tangga perlu bantuan ketika shock, tetapi juga aset dan kesempatan agar dapat mandiri.

Semua ini menunjukkan bahwa keadilan sejati bukan ketergantungan, melainkan perluasan kemampuan.

Ketika masyarakat memiliki kemampuan, mereka dapat berpartisipasi, berinovasi, mengkritik, dan membangun masa depan. Inilah hubungan antara martabat dan produktivitas.

Indonesia Emas 2045 akan lebih bermakna bila tidak hanya ditandai gedung, jaringan, dan angka pendapatan, tetapi oleh masyarakat yang merasa memiliki tempat dalam ekonomi.

Anak dari keluarga miskin harus memiliki peluang menjadi profesional atau entrepreneur. Pekerja informal harus memiliki jalan menuju perlindungan. Daerah terpencil harus memiliki akses dasar. Penyandang disabilitas harus dapat berpartisipasi tanpa barrier yang dibuat manusia.

Kelas menengah harus dapat membangun aset, bukan hidup satu shock dari kerentanan. Orang tua harus dapat memasuki usia lanjut tanpa takut kehilangan seluruh keamanan ekonomi.

Generasi muda harus menerima lingkungan serta fiskal yang tidak dibebani seluruhnya oleh keputusan masa kini.

Jika kondisi itu terwujud, pertumbuhan akan memperoleh makna sosial yang jauh lebih besar. Angka makro menjadi refleksi dari kemampuan manusia yang meningkat.

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah pembangunan yang memperbesar ruang hidup rakyat: ruang untuk belajar, bekerja, memilih, memiliki, menyampaikan suara, dan berharap.

Pertumbuhan memperbesar sumber daya; pemerataan memperluas akses; keadilan menata aturan; dan martabat memberi arah.

Keempat unsur itu perlu berjalan bersama agar Indonesia bukan hanya menjadi ekonomi besar, tetapi menjadi masyarakat yang besar dalam penghormatan terhadap manusia.

Itulah agenda yang paling layak diwariskan: ekonomi yang produktif, kesempatan yang luas, institusi yang adil, dan rakyat yang hidup dengan martabat.

Tambahan Penegasan: Dari Kebijakan Sosial menuju Arsitektur Keadilan

Agenda ekonomi berkeadilan perlu bergerak dari pendekatan yang memisahkan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial. Dalam praktik pembangunan, keduanya saling membentuk. Kebijakan industri menentukan struktur pekerjaan; kebijakan perumahan menentukan akses terhadap kota produktif; kebijakan transportasi menentukan radius kesempatan; kebijakan persaingan menentukan harga serta bargaining; kebijakan pajak menentukan kapasitas negara; dan kebijakan pendidikan menentukan siapa yang mampu mengisi pekerjaan masa depan. Karena itu, kementerian dan pemerintah daerah perlu memiliki kerangka bersama yang menilai

dampak produktivitas sekaligus distribusi. Koordinasi tidak cukup melalui rapat, tetapi harus diwujudkan dalam indikator bersama dan tanggung jawab yang dapat ditelusuri.

Arsitektur keadilan juga membutuhkan mekanisme koreksi. Tidak ada kebijakan yang sempurna sejak awal. Subsidi dapat salah sasaran, AI dapat bias, pembangunan jalan dapat memunculkan kenaikan harga tanah, dan investasi industri dapat menekan lingkungan. Negara yang adil bukan negara yang tidak pernah salah, tetapi negara yang menyediakan data, complaint, review, dan kemampuan memperbaiki kesalahan sebelum dampaknya menjadi permanen. Budaya evaluasi menjadi bagian martabat karena warga melihat bahwa pengalaman mereka dapat memengaruhi perubahan kebijakan.

Penting pula membedakan antara kesetaraan formal dan kesetaraan substantif. Menyediakan aturan yang sama bagi semua orang belum tentu adil bila biaya memenuhinya sangat berbeda. Persyaratan digital yang sama dapat lebih berat bagi warga tanpa perangkat; biaya pendidikan yang sama dapat lebih membebani keluarga miskin; jarak pelayanan yang sama dalam kilometer dapat memiliki arti berbeda pada wilayah kepulauan. Kebijakan substantif mempertimbangkan hambatan nyata, bukan hanya kesamaan prosedur di atas kertas.

Keadilan ekonomi juga harus menjaga ruang bagi inovasi dan penghargaan terhadap usaha. Masyarakat yang adil tetap membutuhkan entrepreneur, investor, ilmuwan, pekerja terampil, dan organisasi yang berani mengambil risiko. Yang perlu dijaga adalah agar reward berasal dari penciptaan nilai, bukan akses istimewa kepada kekuasaan, monopoli yang dipertahankan secara artifisial, atau eksploitasi informasi. Dengan cara itu, merit, inovasi, dan fairness dapat berjalan bersama. Ekonomi menjadi dinamis tanpa kehilangan legitimasi.

Di tingkat rumah tangga, martabat sering bergantung pada hal-hal yang tampak sederhana: kepastian jadwal kerja, kemampuan membayar sewa tanpa berutang, akses dokter ketika anak sakit, sekolah yang tidak membedakan berdasarkan status, transportasi yang aman, dan pelayanan administrasi yang tidak membuat orang menunggu tanpa penjelasan. Karena itu, indikator makro perlu diterjemahkan ke indikator pengalaman kehidupan. Pembangunan yang berhasil membuat ketidakpastian sehari-hari semakin dapat dikelola dan pilihan hidup semakin luas.

Di tingkat daerah, prinsip keadilan menuntut perhatian pada kemampuan fiskal dan administratif yang berbeda. Daerah dengan geografi sulit, basis pajak kecil, atau kekurangan tenaga profesional membutuhkan dukungan lebih besar untuk mencapai standar layanan yang sama. Ini bukan perlakuan istimewa, melainkan pengakuan bahwa equal outcome minimum kadang memerlukan unequal input. Namun dukungan perlu disertai pembelajaran institusional agar dependency tidak permanen dan kapasitas lokal terus tumbuh.

Di tingkat generasi, pembangunan berkeadilan mengharuskan pemerintah dan bisnis membedakan antara pengeluaran yang habis serta investasi yang meninggalkan kapasitas. Pendidikan, riset, infrastruktur resilient, restorasi alam, dan sistem kesehatan memperluas kemampuan masa depan. Sebaliknya, utang yang tidak menghasilkan aset, eksploitasi sumber daya tanpa reinvestasi, atau kerusakan lingkungan mempersempit pilihan generasi berikut. Keadilan antargenerasi memberi disiplin agar keberhasilan hari ini tidak dibayar dengan beban yang disembunyikan.

Pada titik ini, martabat rakyat dapat dipahami sebagai prinsip integratif. Ia menyatukan hak ekonomi, kesempatan, layanan, rule of law, lingkungan, dan partisipasi. Martabat tidak meniadakan kebutuhan akan pertumbuhan; ia memberikan alasan mengapa pertumbuhan harus dikelola dengan cara tertentu. Pertumbuhan yang bermartabat memberi ruang bagi manusia untuk berkembang, bukan sekadar bertahan. Ia memungkinkan warga mengubah kemampuan menjadi prestasi tanpa terhalang asal-usul yang tidak mereka pilih.

Indonesia memiliki peluang sejarah untuk membangun model pembangunan seperti itu karena masih berada pada fase transformasi besar. Urbanisasi, digitalisasi, hilirisasi, energi hijau, dan perubahan demografi akan

membentuk struktur ekonomi beberapa dekade ke depan. Keputusan yang dibuat sekarang akan menentukan apakah transformasi tersebut menciptakan masyarakat yang lebih terbuka atau justru memperkuat konsentrasi. Karena itu, memasukkan keadilan dan martabat sejak tahap desain jauh lebih murah dan efektif daripada memperbaiki ketimpangan setelah mengakar.

Visi akhirnya bukan masyarakat tanpa kompetisi atau tanpa perbedaan, tetapi masyarakat yang kompetisinya berlangsung di atas fondasi kesempatan yang lebih fair, rule of law yang lebih kuat, dan layanan dasar yang lebih dapat dipercaya. Warga dapat gagal dan mencoba lagi tanpa kehilangan seluruh martabat; perusahaan dapat tumbuh karena inovasi; pekerja dapat naik karena skill; daerah dapat maju karena kapabilitas; dan generasi berikut menerima lebih banyak pilihan. Itulah bentuk ekonomi Indonesia yang berkeadilan dalam arti yang paling substantif.

Sebagai ukuran praktis, pemerintah dapat menerapkan dignity impact statement pada kebijakan yang berhubungan langsung dengan layanan, pekerjaan, atau hak sosial. Dokumen singkat tersebut tidak perlu menjadi birokrasi tambahan yang berat. Isinya dapat menjawab apakah prosedur mudah dipahami, apakah kelompok rentan dapat mengakses, apakah keputusan otomatis memiliki jalur koreksi, apakah privasi terjaga, dan apakah bahasa serta perlakuan berpotensi menstigma. Dengan mekanisme sederhana ini, aspek martabat masuk ke desain sejak awal, bukan hanya dievaluasi setelah keluhan muncul. Pendekatan serupa dapat digunakan oleh perusahaan pada kebijakan HR, penagihan, penggunaan data, atau restrukturisasi tenaga kerja.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat tradisi evaluasi independen. Program yang populer secara politik belum tentu efektif, sedangkan program yang tidak terlihat dapat memiliki dampak besar. Evaluasi oleh perguruan tinggi, BPS, lembaga audit, dan masyarakat sipil membantu memisahkan klaim dari hasil. Data perlu dibuka dalam bentuk yang melindungi privasi tetapi memungkinkan analisis. Pemerintah yang bersedia mengubah program berdasarkan bukti justru menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Keadilan membutuhkan kemampuan mengakui ketika desain menghasilkan exclusion, ketimpangan, atau beban yang tidak diperkirakan.

Perusahaan juga perlu melihat martabat sebagai bagian dari manajemen risiko dan reputasi jangka panjang. Praktik kerja yang legal tetapi dianggap eksploitatif dapat memicu turnover, konflik, dan kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, organisasi yang memiliki fairness, safety, dan jalur pengembangan lebih mudah mempertahankan talenta. Pada rantai pasok, pembayaran tepat waktu serta standard yang jelas membantu supplier kecil tumbuh. Dalam hubungan konsumen, transparansi biaya dan penggunaan data membangun trust. Dengan demikian, penghormatan terhadap manusia bukan sekadar kewajiban etis; dalam banyak situasi ia juga merupakan investasi pada kualitas hubungan ekonomi.

Kampus dan lembaga pendidikan tinggi mempunyai posisi khusus dalam agenda ini. Mereka dapat membangun bahasa bersama antara ekonomi, manajemen, etika, teknologi, hukum, dan pembangunan. Mahasiswa bisnis perlu belajar bahwa keputusan harga, outsourcing, algoritma, lokasi, dan pembiayaan selalu memiliki konsekuensi distribusi. Mahasiswa teknologi perlu memahami bahwa model yang akurat belum tentu adil. Mahasiswa kebijakan perlu memahami bahwa niat sosial yang baik belum tentu efektif bila incentive dan kapasitas organisasi diabaikan. Pendidikan lintas disiplin membentuk pemimpin yang mampu menggabungkan produktivitas dengan martabat.

Pada akhirnya, perjalanan menuju ekonomi Indonesia yang berkeadilan akan selalu melibatkan trade-off. Tidak semua tuntutan dapat dipenuhi sekaligus dan sumber daya publik terbatas. Justru karena itulah prinsip keadilan, transparansi, dan martabat dibutuhkan sebagai kompas. Kebijakan perlu menjelaskan alasan, membandingkan alternatif, memberi perhatian pada yang paling terdampak, dan meninggalkan ruang koreksi. Dengan proses seperti itu, perbedaan pendapat tidak harus berubah menjadi kehilangan kepercayaan.

Masyarakat dapat menerima keputusan sulit ketika mereka melihat aturan yang wajar dan perlakuan yang hormat. Ekonomi berkeadilan pada akhirnya adalah ekonomi yang mampu bertumbuh sambil menjaga hubungan saling percaya antara negara, pasar, dan rakyat.

Penguatan ekonomi berkeadilan juga memerlukan bahasa kebijakan yang tidak memecah masyarakat menjadi penerima dan pemberi manfaat secara kaku. Hampir setiap warga pada satu tahap kehidupan menjadi pembayar pajak, pengguna layanan, pekerja, pasien, orang tua, pelaku usaha, atau penerima perlindungan. Universalitas pengalaman tersebut membantu membangun solidaritas. Program yang dirancang dengan prinsip universal tetapi memberi intensitas lebih besar kepada yang membutuhkan dapat mengurangi stigma sekaligus menjaga efisiensi. Pendekatan ini relevan pada kesehatan, pendidikan, transportasi, dan layanan dasar lain yang manfaatnya dirasakan lintas kelas.

Prinsip terakhir adalah bahwa pembangunan perlu meninggalkan kapasitas, bukan hanya konsumsi. Setiap rupiah publik dan setiap investasi besar sebaiknya ditanya warisan apa yang tertinggal: apakah ada pekerja lebih terampil, perusahaan lebih produktif, rumah tangga lebih aman, daerah lebih mampu, layanan lebih baik, atau lingkungan lebih sehat. Ketika jawaban tersebut positif, pertumbuhan memiliki efek yang melampaui satu tahun anggaran. Ia berubah menjadi kemampuan sosial yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan keadilan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, ekonomi Indonesia yang berkeadilan bukan sebuah keadaan final, melainkan proses institusional yang terus diperbaiki. Ukurannya adalah semakin luas kesempatan untuk berkembang, semakin kecil peran koneksi dan keadaan lahir dalam menentukan masa depan, semakin manusiawi layanan serta pekerjaan, dan semakin kuat kemampuan generasi berikut untuk memilih jalan hidupnya. Pertumbuhan, pemerataan, dan martabat rakyat kemudian menjadi satu kesatuan strategi pembangunan nasional.

Ke depan, konsistensi menjadi sangat penting. Perubahan pemerintahan, teknologi, dan siklus ekonomi akan mengubah instrumen, tetapi tujuan dasarnya perlu tetap: produktivitas yang meningkat, peluang yang meluas, pelayanan yang menghormati, serta beban pembangunan yang dibagi secara wajar. Konsistensi tujuan memberi kepastian bagi keluarga untuk berinvestasi pada pendidikan, bagi perusahaan untuk melatih pekerja, dan bagi daerah untuk membangun kapasitas. Adaptasi instrumen memastikan kebijakan tidak membeku ketika fakta berubah.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan keadilan sebagai keunggulan pembangunan. Masyarakat yang lebih sehat, terdidik, aman, dan percaya pada institusi akan lebih siap berinovasi serta menghadapi disrupsi. Ekonomi yang memperlakukan manusia dengan martabat memperoleh sesuatu yang tidak mudah dihitung tetapi sangat berharga: kemauan untuk bekerja sama, membayar pajak, mematuhi aturan, mengambil risiko, dan menjaga ruang hidup bersama. Modal sosial tersebut dapat menjadi salah satu fondasi terkuat Indonesia menuju 2045.

Karena itu, ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah apakah rakyat merasakan bahwa hidup mereka memiliki lebih banyak kemungkinan. Apakah anak dapat belajar dengan baik tanpa ditentukan kekayaan orang tua; apakah pekerja dapat naik karena kemampuan; apakah usaha kecil dapat memperoleh pasar tanpa patron; apakah pasien menerima pelayanan tanpa kehilangan harga diri; apakah teknologi memperluas kesempatan; dan apakah pembangunan hari ini tidak menutup masa depan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa ekonomi kembali pada tujuan dasarnya: meningkatkan kemampuan manusia untuk hidup secara aman, produktif, bebas, dan bermakna. Bila pertumbuhan Indonesia terus disertai pemerataan kesempatan, institusi yang adil, dan penghormatan terhadap martabat, maka kemajuan ekonomi akan memperoleh dasar sosial yang lebih kuat dan lebih tahan lama.